

**SKRIPSI**

**PERAN LEMBAGA KETAHANAN SWADAYA MASYARAKAT  
DESA (LKSMD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DI DESA BUNTU PEMA KECAMATAN CURIO  
KABUPATEN ENREKANG**



**BAHARUDDIN  
2014.235.00.133**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
MAKASSAR  
2017**

**SKRIPSI**

**PERAN LEMBAGA KETAHANAN SWADAYA  
MASYARAKAT DESA (LKSMD) DALAM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA  
BUNTU PEMA KECAMATAN CURIO  
KABUPATEN ENREKANG**

**Disusun dan diajukan oleh**

**BAHARUDDIN  
2014.235.00.133**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Administrasi Publik**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
MAKASSAR  
2017**

**SKRIPSI  
PENGESAHAN**

**PERAN LEMBAGA KETAHANAN SWADAYA MASYARAKAT DESA  
(LKSM) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BUNTU  
PEMA KECAMATAN CURIO KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan Oleh

**BAHARUDDIN**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.235.00.133

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 27 November 2017

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph. D

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar

Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

## SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL : PERAN LEMBAGA KETAHANAN PANGAN SWADAYA MASYARAKAT DESA (LKSMD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BUNTU PEMA KECAMATAN CURIO KABUPATEN ENREKANG.**

Pada hari ini, Senin, 27 November 2017 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama **Baharuddin** dengan Nomor Pokok 2014.235.00.133

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Dr. Guntur Karnaeni, M.Si

Sekretaris : Deasy Mauliana, SH., MH

Anggota : Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph. D



  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya :

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 27...NOVEMBER 2014.

Yang menyatakan,



6000  
EMAS MURUPAH

RAIKARUPDIN

NPM. 201423500133

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Akademik.....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Teori.....	8
1. Konsep Peran/Peranan .....	8
2. Konsep Perencanaan .....	9
3. Konsep Kelembagaan .....	12
4. Pemberdayaan Masyarakat .....	14
5. Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa/LKSMD ..	28
6. Pembangunan Desa.....	34
7. LKSMD dalam Perwujudan Pembangunan di Desa.....	37
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	41
C. Deskripsi Fokus Penelitian.....	37
D. Kerangka Konsep.....	42
E. Pertanyaan Penelitian.....	43
<b>BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	45
B. Desain Penelitian .....	45
C. Sumber Data.....	46
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	48

F. Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian .....	53
B. Karakteristik Sumber Data.....	59
C. Paparan dan Reduksi Data .....	62
D. Hasil Analisis Data .....	64
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar. 1 Kerangka Konsep.....	40
--------------------------------	----



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sebagai pemilik semesta yang maha segala-galanya, kerana dengan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir Skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio”** Dimana skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Administrasi Publik STIA LAN Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis sebagai makhluk biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis berbesar hati dan membuka diri untuk menerima kritikan dan saran dari pihak yang membaca skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pembuatan skripsi setelah penelitian selesai. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda Alm. Pelang dan Ibunda Wari** atas dorongan dan do'anya yang tidak pernah putus dan telah meringankan langkah penulis untuk menghadapi segala kesulitan yang menghadang. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph. D.** selaku ketua STIA LAN Makassar sekaligus pembimbing utama yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis hingga menyelesaikan tulisan ini.
2. **Segenap Staff dan Karyawan** STIA LAN Makassar yang telah banyak membantu.
3. Istri saya **Dahlia** atas segala motivasi dan dukungan yang tiada henti selama menyelesaikan skripsi ini, dan selalu ikhlas untuk direpotkan dan mendengarkan keluhan saya.
4. Anak-anak saya **Darwanto, Miswar** dan **Kurniawan** atas segala *support* dan dukungannya selama ini.
5. Seluruh **keluarga besar** yang telah membantu secara moril maupun materi.
6. Saudara-saudaraku **Muh Yusuf, Alm. Japaruddin, Syarif** dan **Syamsia** atas seluruh kasih sayang dan pengertian yang telah diberikan.
7. Teman-teman Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik khususnya **kelas Enrekang** yang senantiasa memberi support.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pembaca khususnya teman-teman mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, STIA LAN Makassar. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Penulis,

Baharuddin

## **INTISARI**

### **PERAN LEMBAGA KETAHANAN SWADAYA MASYARAKAT DESA (LKSMD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BUNTU PEMA KECAMATAN CURIO KABUPATEN ENREKANG**

Penulis : Baharuddin  
Penasehat : Amir Imbaruddin

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, dan bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio.

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan melalui proses wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan carat anta jawab langsung kepada informan. Temuan hasil penelitian ini yaitu dari indikator Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa sebagai fasilitator, mediator, motivator dan dinamisator.

Hasil penelitian adalah adanya kendala yang ditemukan dalam membangkitkan peran masyarakat dalam LKSMD seperti masih kurangnya memiliki rasa kepedulian untuk berpartisipasi dan bertanggungjawab. Hal ini diakibatkan masih lemahnya peran serta fungsi pemerintah Desa dalam melakukan upaya memberdayakan serta kurangnya motivasi dari para fasilitator. Untuk memperbaiki semuanya maka perlu adanya pembenahan dari pemerintah setempat maupun fasilitator dalam mensosialisasi serta mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam melaksanakan program-program LKSMD Desa Buntu Pema

Kata Kunci : Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa, Perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten.

## **ABSTRACT**

### ***THE ROLE OF THE INSTITUTION OF SELF- RESILIENCE OF THE VILLAGES (LKSMD) IN DEVELOPMENT PLANNING IN THE VILLAGE OF BUNTU PEMA CURIO DISTRICT***

*Author* : Baharuddin  
*Supervishors* : Amir Imbaruddin

*The main problem in this research is how the role of Village Self-Resilience Institution (LKSMD) in development planning in Buntu Pema Village, Curio District, Enrekang Regency, and aims to know the role of Village Self-Resilience Institution (LKSMD) in development planning in Buntu Pema Village, Curio.*

*In this research using qualitative research methodology through interview and observation process. The interview was conducted with direct answer to the informant. The findings of this research are from the indicators of Non-Governmental Self-Resilience Institution as Facilitator, Mediator, Motivator and Dynamicator.*

*The obstacles found in generating the role of the community in LKSMD are still lack of a sense of concern for participating and being responsible. This is due to the weak role of the village government in making efforts to empower and lack of motivation from the facilitators. To improve everything, there needs to be improvement from the local government and facilitator in socializing and invite all the community to participate directly in implementing LKSMD program of Desa Buntu Pema.*

*Keywords: Village Self-Resilience Institution, Planning Development, District Government.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan Lembaga Keuangan serta kegiatan - kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehjateraan masyrakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan

harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan dikawasan pedesaan dapat menyeluruh terhadap masyarakat.

Menurut Harjanto (2008) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Pada masa sentralisasi atau pemerintahan terpusat penyusunan program pembangunan daerah menggunakan mekanisme *top down* yaitu proses perencanaan dari pusat kepada daerah, sehingga terkadang program yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah. Maka dari itu agar tercapai keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Berawal dari terbentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), LKMD membuat kesepakatan supaya melakukan temu LKMD tingkat nasional di Bandung pada tanggal 18-21 Juli 2000 telah berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat

mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 94 ayat (1) berbunyi desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Kemudian yang lebih terinci lagi adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. Inilah sebagai landasan hukum dibentuknya LKMD.

LPM dipakai sebagai pengganti nama LKMD. LPM dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan.

Dalam forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional tersebut akhirnya terjadi kesepakatan Nasional yang dikenal dengan “Deklarasi Bandung” memuat 2 (dua) hal yang sangat fundamental yakni :

1. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

2. Terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM.

Lembaga Pembedayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat desa, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa, yang bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, Meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata, Meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam pembangunan desa LPMD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat



Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Wilayah penelitian ini berada di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio. Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio adalah salah satu Desa yang berada pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Enrekang. Masyarakat Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio mayoritas penghasilannya dari sektor pertanian. Di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio masih menggunakan Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD).

Pihak LKSMD tidak menentukan sendiri pembangunan apa yang paling diutamakan atau dibutuhkan di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio tersebut, akan tetapi melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan seperti apa yang dibutuhkan. LKSMD juga tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan suatu pembangunan, tetapi masyarakat juga terlibat dalam pembangunan tersebut.

Keadaan pembangunan di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio tersebut sudah lumayan baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dulu keadaan infrastruktur di Desa tersebut masih sangat kurang seperti pembangunan jalan umum, dulu keadaan jalan di Desa tersebut masih tanah yang mana apabila hujan turun keadaan jalannya masih becek. Sekarang ini infrastrukturnya sudah lumayan bagus.

Alasan peneliti kenapa tertarik untuk melakukan penelitian di Di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang ini karena kebetulan asal peneliti sendiri dari Desa Buntu Pema, kemudian alasan lain peneliti adalah

karena peneliti melihat LKSMD di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio tersebut masih aktif tidak seperti di Desa-desa lain yang ada di Kecamatan lain dan pembangunan yang ada di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio tersebut sekarang ini terus meningkat.

Keadaan suatu desa memang harus terus maju dan meningkat baik dari segi pembangunannya, maka dari itu peran LKSMD sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan desa. Serta mengerti juga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam pembangunan. Hubungan LKSMD dengan pemerintah desa harus selalu baik begitu juga dengan masyarakatnya agar pembangunan berjalan dengan baik juga. Namun, terkadang masyarakat kurang mau berpartisipasi dalam pembangunan, maka dari itu sangat dibutuhkan peran aktif dari LKSMD dalam menyikapi masalah tersebut agar masyarakat merasa diberdayakan dan akhirnya mau berpartisipasi dalam pembangunan sehingga tercapai pembangunan desa yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas yaitu untuk mengetahui peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi referensi baik pada perpustakaan departemen Ilmu Administrasi Negara maupun peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan masalah peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini juga diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan menulis berdasarkan kajian teori yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara.

#### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama dalam pembangunan desa mengenai peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Konsep Peran / Peranan**

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut.

Menurut Soekanto (2003), peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macammacam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang akan diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan satu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu tindakan/ perbuatan seseorang dalam suatu pekerjaan/ kedudukan, dan apabila seseorang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan pekerjaan/ kedudukannya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah menjalankan peranannya dengan baik.

Menurut Narkowi (2004) fungsi peranan adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat  
Menghidupkan sistem pengendali dan control sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

## **2. Konsep Perencanaan**

Menurut Hanafi (2004 : 2) perencanaan adalah suatu proses yang mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada didalam organisasi. Dari definisi diatas yang dikemukakan oleh Mahduh M. Hanafi dapat di artikan bahwa perencanaan merupakan fungsi yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan selalu melekat dalam kegiatan hidup kita sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Sebuah perencanaan akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang direncanakan. Dengan melakukan perencanaan berarti kita bisa mengukur, mengendalikan dan dapat mengevaluasi setiap pekerjaan.

Widjaja (2003: 45) perencanaan adalah bentuk tertentu mengenai pembentukan kebijaksanaan. Dinyatakan dalam bentuk hubungan timbal balik antara kebijaksanaan dengan hukum. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses kebijaksanaan.

Menurut wasistono (2006: 55) konsep perencanaan dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya.

Menurut Manullang (2004: 45), mengatakan bahwa untuk membuat suatu rencana ada beberapa tingkatan yang harus dilalui. Tingkatan atau langkah-langkah tersebut adalah:

1. Menetapkan tugas dan tujuan. Maksudnya tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu agar dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dari serangkaian aktivitas dan tindakan yang akan dilaksanakan.
2. Mengobservasi dan menganalisis. Maksudnya keadaan atau kondisi yang dimiliki oleh organisasi harus dianalisa dengan tujuan untuk menemukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Hal ini sangat penting agar rencana yang disusun realistis dan objektif.
3. Membuat kemungkinan-kemungkinan. Maksudnya peluang yang mungkin diraih serta hambatan-hambatan yang muncul perlu diidentifikasi. Hal ini akan memberikan gambaran yang luas tentang kondisi eksternal organisasi agar rencana yang disusun dapat mengoptimalkan peluang dan bisa menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.
4. Menyusun rencana. Merupakan konsep tentang segala kegiatan yang dilaksanakan, hal ini agar organisasi mempunyai konsep aktivitas yang jelas serta kearah mana hasil yang ingin dicapai dari sebuah aktivitasnya.

Selain itu juga Perencanaan merupakan proses untuk menentukan ke mana harus melangkah dan mengidentifikasi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dengan cara efektif dan efisien. Perencanaan yang baik dalam diri

manusia atas segala tindakan selama di dunia ia akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Dalam setiap langkah gerak , manusia harus introspeksi memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk kebaikan masa depan, dengan kata lain berarti manusia harus memiliki rencana, sehingga manusia hidupnya terarah dan tidak terjerumus dalam kesesatan.

Menurut Kunarjo (2002). Perencanaan dapat dikelompokkan berdasarkan :

- a. Jangka waktu,
- b. Sifat perencanaan,
- c. Alokasi sumber daya,
- d. Tingkat keluwesan,
- e. Sistem ekonomi,
- f. Arus informasi
- g. Dimensi pendekatan.

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu *pertama*, perencanaan jangka panjang di dalamnya ditetapkan nilai-nilai, target dan sasaran yang biasanya dirumuskan dalam bentuk visi dan misi serta strategi jangka panjang. *Kedua*, jangka menengah, merupakan kebijakan sebagai proyeksi dari target dan sasaran menengah sebagai arah dan pedoman penyusunan rencana jangka pendek. *Ketiga*, perencanaan jangka pendek, yang berisi rencana teknis yang di dalamnya telah ditetapkan target sasaran masing-masing sektor sekaligus sumber daya yang harus disediakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan sifatnya, terdapat perencanaan komando (*planning by direction*) yaitu perencanaan yang mengedepankan instruksi dari atas ke bawah dan perencanaan dengan rangsangan (*planning by inducement*) yaitu perencanaan yang mengandalkan partisipasi dari bawahan atau dari warga

masyarakat. Sedangkan berdasarkan alokasi sumber daya, perencanaan dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama* perencanaan keuangan yaitu perencanaan yang bertujuan untuk memastikan apakah sumber keuangan yang ada benar-benar cukup untuk mendukung pelaksanaan perencanaan fisik. *Kedua*, perencanaan fisik yaitu perencanaan yang bertujuan untuk menjabarkan usaha pembangunan melalui pengalokasian sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan tingkat keluwesan terdapat perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif. Berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara terdapat perencanaan dalam kapitalisme, perencanaan dalam sosialisme dan perencanaan dalam ekonomi campuran. Dilihat dari sudut pandang pelaksanaannya (arus informal), terdapat perencanaan sentralistik (*centralized*) atau *top-down planning* dan perencanaan desentralistik (*decentralized*) atau *bottom-up planning*. Berdasarkan dimensi pendekatan terdapat perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional dan perencanaan mikro.

### **3. Konsep Kelembagaan**

#### **1. Pengertian Kelembagaan**

Menurut Ruttan dan Hayami (1984), Kelembagaan adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Menurut Uphoff (1986), Kelembagaan adalah suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu



periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

## 2. Unsur-unsur Kelembagaan

Dari berbagai definisi yang ada, dapat kita rangkum berbagai unsur penting dari kelembagaan, di antaranya adalah:

- a. Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat
- b. Norma tingkah laku yang mengikat dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur
- c. Peraturan dan penegakan aturan/hukum
- d. Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota
- e. Kode etik
- f. Kontrak
- g. Pasar
- h. Hak milik (*property rights* atau *tenureship*)
- i. Organisasi
- j. Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat

##### a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebuah gerakan penguatan sosial agar masyarakat tadinya lemah, baik dalam bidang sosial, ekonomi serta politik, diberdayakan sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan potensi yang mereka miliki dan guna membangun serta menentukan tindakan berdasarkan keinginan mereka secara mandiri melalui strategi dan pendekatan.

Zubaedi (2007) mengutip pernyataan Eddy Ch Papilaya mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan nyata. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah “proses menjadi” bukan “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki “sesuatu”. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *belief*, dan *healing*.

Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka sendiri. Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut *capacity building* atau dalam bahasa sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk diberidaya atau kuasa, yang bersangkutan harus memiliki kemampuan. Proses *capacity building* terdiri dari tiga jenis, yaitu: manusia, organisasi dan sistem nilai.

Pengkapasitasan manusia diartikan sebagai pemberian kapasitas kepada individu atau kelompok manusia untuk menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Pengkapasitasan organisasi diibaratkan menyiapkan wadah sebelum meletakkan bahannya di atas wadah tersebut. Pengkapasitasan ketiga adalah sistem nilai. Setelah manusia dan wadahnya dikapitasasikan, sistem nilai pun demikian. Sistem nilai adalah aturan main. Dalam cakupan organisasi, sistem nilai berkenaan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sistem dan prosedur, peraturan koperasi dan sejenisnya. Tahap ketiga adalah pendayaan. Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut

baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*). Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya.

Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat, Suharto (dalam Swedianti, 2011:5) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan, dan kelompok terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan lembaga keuangan serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil

produksinya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diridalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.

Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat bottom up yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Pemberdayaan partisipasi masyarakat hingga di tingkat lembaga lembaga lokal, akan dapat menggerakkan perekonomian wilayah. sejalan dengan itu, dipastikan sosial kapital akan meningkat. Namun demikian pemberdayaan partisipasi masyarakat di Indonesia khususnya pada saat sekarang tidak berkolerasi dengan meningkatnya social capital, masyarakat saat ini memang sedang ‘berdaya‘ tetapi belum mengkait dengan kenaikan kesejahteraan sebaliknya mengakibatkan ekonomi memburuk bahkan menimbulkan perilaku-perilaku sekelompok masyarakat yang jauh dari tertib hukum sebagai modal utama untuk membangun modal sosial.

Menurut Sunyoto Usman (2008 : 21) menyatakan bahwa Setidak- tidaknya ada dua macam perspektif yang relevan untuk mendekati persoalan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin agar lebih memiliki akses pada pelayanan kesehatan, yaitu :

- a. Perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada alokasi sumber daya (*resource allocation*).
- b. Perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada penampilan kelembagaan (*institutional performance*).

Dari pendapat tersebut, penulis menyimpulkan dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menggali potensi – potensiyang ada atau dimiliki oleh masyarakat tersebut dan ditujukan untuk tujuan pembangunan, lalu ditumbuh kembangkan peran serta masyarakat untuk ikutterlibat baik itu melalui pemberian motivasi atau dorongan yang diberikan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri bagi mereka langkah yang akan ditempuh dalam peningkatan hidupnya.

Pendekatan budaya sangat diperlukan untuk mendorong pemberdayaan partisipasi manusia sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah provinsi mampu mengoptimalkan wilayah, dengan peluang kerja sama antar wilayah Kabupaten/Kota, dan mengembangkan tranformasi sektor primer ke arah industri pengolahan. Hal ini mendorong pembelajaran seluruh SDM baik dunia usaha (*individul enterpreneur*), masyarakat (*social enterprener*), maupun aparat (*intrapreneur*), sebagai modal peningkatan kualitas SDM menuju terbentuknya masyarakat yang madani, dalam posisi ini pemerintah, dunia swasta

dan masyarakat menjalankan fungsi *good governance* Effendi (dalam Iwan Nugroho, dkk, 2005 ; 363) untuk mendorong tumbuhnya produktivitas ekonomi dan tercapainya kesejahteraan. Dengan demikian ada dua unsur yang penting dari pemberdayaan adalah desentralisasi dan pengembangan kapasitas, keduanya merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Desentralisasi berarti *to give power or authority*, sementara pengembangan kapasitas berarti *to give ability*, keduanya merupakan dua konsep penting pengertian konvensional pemberdayaan Wrihatnolo dan Dwidjowijojo (dalam Soetomo, 2009: 418).

Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Tahapan selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera. Dalam kata mandiri telah terkandung pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Dalam pemandirian masyarakat miskin hendaknya tidak mengabaikan potensi dan kapasitas yang tersisa dalam diri maupun kelompoknya serta menghindarkan diri dari budaya cepat puas dan merasa cukup. Dalam pemandirian masyarakat miskin diajak untuk mengembangkan jejaring komunikasi sehingga mereka bisa menambah wawasan dan selalu

diingatkan untuk memiliki pikiran yang maju berwawasan jauh kedepan untuk menjangkau kondisi yang lebih baik.

Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat menjadi salah satupilar dalam penanggulangan kemiskinan. Dikemukakan bahwa konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan (Harianja, 2008).

#### **b. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Prinsip dan dasar dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) terdiri dari lima macam, yaitu:

- 1) Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- 2) Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- 3) Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- 4) Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.



- 5) Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan (Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).

### **c. Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan (Suharto,

2006:59). Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993). Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Menurut United Nations (1956:83-92 dalam Tampubolon, 2006), proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) *Getting to know the local community*; Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
- 2) *Gathering knowledge about the local community*; Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
- 3) *Identifying the local leaders*; Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "the local leaders" harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

- 4) *Stimulating the community to realize that it has problems*; Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- 5) *Helping people to discuss their problem*; Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
- 6) *Helping people to identify their most pressing problems*; Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.
- 7) *Fostering self-confidence*; Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
- 8) *Deciding on a program action*; Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
- 9) *Recognition of strengths and resources*; Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
- 10) *Helping people to continue to work on solving their problems*; Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.
- 11) *Increasing people's ability for self-help*; Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Ide menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Menurut Oakley dan Marsden (1984), proses pemberdayaan mengandung dua kecendrungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau

mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melalui organisasi. Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Menurut Kartasmita (1995:19), upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:

- 1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun social (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.
- 3) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

#### d. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Suharto (2005: 67), Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dengan 5 P, yaitu :

1) Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekar-sekar kultural dan struktural yang menghambat.

2) Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kaembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3) Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dengan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang menguntungkan rakyat kecil.

4) Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5) Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Edi Suharto (2005:68) juga memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat :

1) Membangun realisasi pertolongan yang merefleksikan respon emapti, menghargai pilihan dan hak menentukan nasibnya sendiri

(*self deterioration*), menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kebersamaan.

- 2) Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri, mempertimbangkan keragaman individu.
- 3) Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-haknya, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar dan melibatkannya dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- 4) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

#### e. **Lingkup dan Tingkatan Pemberdayaan**

Dari kajian-kajian empiris pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat, menurut Alshop dan Heinshon (2005), menggambarkan 3 hal dalam lingkup pemberdayaan, yaitu pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial, sedangkan Ndraha (dalam Sumaryadi, 2005) menyebutkan satu lingkup lainnya pemberdayaan lingkungan.

Pemberdayaan politik lebih mengarah kepada upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan meningkatkan posisi tawar masyarakat terhadap pemerintah atau pihak-pihak lainnya, yang meliputi aspek-aspek penegakan keadilan, kepemimpinan politik, dan pelayanan publik.

Pemberdayaan ekonomi adalah pendekatan yang diutamakan kepada masyarakat kelas bawah untuk mampu beraktifitas dalam bidang ekonomi dan memiliki penghasilan yang lebih baik, sehingga mampu menanggung dampak negatif dari pertumbuhan yang terjadi.

Pemberdayaan sosial lebih merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menyadarkan posisi dan peran seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dalam komunitasnya. Pemberdayaan lingkungan adalah upaya yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjalin hubungan baik dalam interaksi manusia dengan lingkungannya.

Tingkatan pemberdayaan adalah semacam batasan luasan wilayah dalam proses pemberdayaan. Alshop dan Heinshon (2005) menjabarkan tingkatan pemberdayaan menjadi tiga tingkatan yaitu *local level*, *intermediary level*, dan *macro level*. Fujikake (2008) mengemukakan tingkatan pemberdayaan yang serupa dengan Alshop dan Haeinshon yaitu sebagai berikut: *micro level*, *mesolevel* dan *macro level*. Maksud dari tingkatan *micro* atau lokal yaitu dalam batasan wilayah lingkungan sekitar masyarakat tersebut atau pada tataran desa atau sekitar tempat tinggal. Tingkatan *meso* atau *intermediary* meliputi wilayah kota, jaringan atau hubungan antar organisasi dan pihak eksternal lain. Tingkatan *macro* adalah tingkatan yang lebih luas dari tingkatan-tingkatan sebelumnya, yaitu setingkat pengambilan keputusan dalam lingkup nasional.

**f. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pemberdayaan dalam paradigma pembangunan masyarakat pada sebuah komunitas bisa dianggap sebagai konsep yang relatif lebih baik dan membawa manfaat yang lebih besar, namun dalam implementasinya masyarakat tidak akan serta merta ikut dan

berpartisipasi penuh dalam program tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yang oleh Sumaryadi (2005: 154-158) dijabarkan menjadi 8 faktor yang berpengaruh sebagai berikut:

- 1) Kesiediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
- 2) Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.
- 3) Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
- 4) Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
- 5) Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
- 6) Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.
- 7) Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
- 8) Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka hasil dari sebuah upaya pemberdayaan akan sangat tergantung dari kondisi masyarakat dan peran serta semua stakeholder yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut.

## **5. Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD)**

Tugas dan Fungsi LKSMD atau sekarang dikenal dengan istilah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai tugas membantu



Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas membantu desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak.

Untuk mengetahui seberapa besar peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio ada beberapa indikator yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah pedesaan (Sunyoto Usman, 2004).

#### **a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Fasilitator**

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan

bawahterhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan(Sutoro Eko, 2002). Salah satu tugas dari LPMD adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPMD Sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat dibidang pembangunan, maka Peran LPMD sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan.Rencana-rencana pembangunan di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan Desa/MusrenbangDes. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (MusrenbangDes) tingkat Desa adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan desayang melibatkan para pelaku pembangunan Desa tujuan, musrenbangDes antarlain :

- 1) Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
- 3) Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan
- 4) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya Desa.
- 5) Menetapkan prioritas kegiatan Desa yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat.

- 6) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

Peran LKSMD sebagai fasilitator di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPMD selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat-perangkat Desa. Peran LKSMD di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPMD didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing antara perangkat desa yang mewakili warga masyarakat Desa Buntu Pema.

Adapun indikator yang digunakan untuk melihat fungsi LPMD sebagai fasilitator adalah :

- 1) Masyarakat ikut merencanakan pembangunan
- 2) Masyarakat ikut menentukan prioritas usulan program pembangunan

#### **b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Mediator**

LPMD sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan Desa terpadu kepada semua elemen

masyarakat. LKSMD Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio mensosialisaikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga desa dan juga melalui bentuk undangan rapat.

Adapun indikator yang digunakan untuk melihat fungsi LPMD sebagai mediator adalah :

- 1) Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan
- 2) Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan

**c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Motivator**

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kabupaten atau kota. banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.

Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum

pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari; 1988).

Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya.

Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi. Adapun indikator yang digunakan untuk melihat fungsi LPMD sebagai motivator adalah :

- 1) Masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun
- 2) Masyarakat ikut merawat pembangunan yang sudah dibuat

#### **d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Dinamisator**

Bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPMD jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili. Pemberian

layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas.

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002). Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

Adapun indikator yang digunakan untuk melihat fungsi LPMD sebagai dinamisator adalah :

- 1) LPMD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan
- 2) LPMD melakukan evaluasi pada program pembangun

## **6. Pembangunan Desa**

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan buruk menuju keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Menurut SP Siagian (1983), pembangunan itu sendiri adalah

suatu usaha atau rangkaian usaha, pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni : harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahannya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis.

Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan dikembangkan adalah pembangunan desa.

Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, (1981:63) mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: “pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.” Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus

diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251) yaitu:

- a. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan system pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kehiatan pemerintahan dan masyarakat.
- b. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essensial kegiatan masyarakat.
- c. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
- d. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
- e. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.



Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

#### **7. Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam Perwujudan Pembangunan di Desa**

Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa dibentuk sebagai wadah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan di desa dengan perubahan atau penyederhanaan pada susunan organisasi dalam mewujudkan masyarakat dalam pembangunan. LKSMD yang sekarang berganti menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan agar dapat terlibat secara nyata dan langsung baik dalam perencanaan maupun sebagai pelaksanaan dalam bidang pembangunan.

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa difasilitasi oleh Kepala Desa dengan motor penggeraknya adalah Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dan partisipasi masyarakat. Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang tujuan pembentukannya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mendukung program pembangunan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan. Tingkat partisipasi pembangunan di suatu desa dapat dikatakan sangat juga dipengaruhi oleh sejauh mana kinerja pengurus LKSMD dan partisipasi masyarakat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung program yang

direncanakan, dan juga harus terciptanya hubungan yang harmonis antara LKSMD dengan Kepala Desa, serta organisasi-organisasi yang ada di desa. Fungsi Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) kearah pembangunan dapat dilihat dalam perencanaan dan pelaksanaan tugasnya yaitu :

- a. Merencanakan pembangunan yang partisipatif, yaitu melibatkan komponen masyarakat dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, yaitu menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan secara terpadu, baik berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, yaitu melaksanakan pembangunan sesuai dengan memanfaatkan alokasi dana yang tersedia baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat dan mengendalikan jalannya pembangunan agar hasil yang di dapat sesuai dengan fungsinya.

Mengendalikan pembangunan dapat juga berupa pemeliharaan hasil-hasil pembangunan agar fungsinya dapat tetap berjalan untuk jangka waktu yang cukup lama.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

1. Wiwin, 2017. Dengan judul penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam Pembangunan Di Desa Salassae Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Peran BPD dalam pembangunan di Desa Salassae Kabupaten Bulukumba Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dimana selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. Sehingga pada tahun 2016 ada dua perdes yang di buat BPD bersama Kepala Desa yakni perdes Sewa aset dan Perdes APBDes. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa. Serta terlibatnya BPD dalam hal pembangunan tanpa harus menunggu adanya keluhan dari masyarakat. Ketika ada aspirasi masyarakat yang menjadi kebutuhan Desa Salassae maka BPD langsung melakukan rapat internal bersama anggota BPD yang lainnya dan apakah aspirasi masyarakat dapat di terima di tindak lanjuti atau bagaimana. Setelah itu BPD Menyampaikan hasil rapat internalnya kepada pemerintah desa dalam hal ini Kepala desa mengenai apa yang menjadi masukan dari masyarakat desa salassae.

2. Hendryk (2013). Dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal demikian dilihat dari partisipasi aktif masyarakat secara

menyeluruh dalam pembangunan desa. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada penelitian tersebut pembangunan lebih banyak memberikan fokus pada tahap perencanaan. Hal tersebut dikarenakan penelitian dilakukan sebelum Undang-undang Desa disahkan. Sementara saat ini Undang-undang Desa telah disahkan dan didalamnya diatur bahwa proses pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya terletak pada *setting* penelitian saja, yaitu waktu dan tempat penelitian, lebih dari itu, penelitian ini juga memiliki kekhasannya sendiri dibanding penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Kekhasan tersebut berkaitan dengan pembahasan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa, adanya pembagian bahasan dan tahap pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), serta digunakannya Undang-undang Desa Tahun 2014 yang telah disahkan dalam penelitian ini.

3. Penelitian Megawati (2008). Yang dilakukan dalam bentuk disertasi di Universitas Padjadjaran dengan judul: partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Studi kelurahan di kotamadya Jakarta Selatan), partisipasi masyarakat dengan adanya komunikasi yang baik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Komunikasi yang bersifat dialogis, berbasis kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, yang menempatkan komunikator dan komunikan dalam posisi yang sama

sebagai subyek, akan meningkatkan keterlibatan mental/emosional, kontribusi dan tanggung jawab dalam pembangunan.

### **C. Deskripsi Fokus Penelitian**

Menurut Singarimbun (2008:33), konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial. Definisi konsep memberikan batasan terhadap pembahasan dari permasalahan yang ditentukan oleh peneliti. Adapun definisi konsep dari penelitian ini, yaitu:

#### **1. Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD)**

LKSMD adalah lembaga atau wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dengan berupaya mewujudkan masyarakat yang partisipatif.

Dimana peran LKSMD dapat dilihat dari 4 fungsinya dengan mengkaji indikator yang ada didalamnya, yaitu :

##### **a. LKSMD sebagai fasilitator**

- 1) Masyarakat ikut dalam merencanakan pembangunan
- 2) Masyarakat ikut dalam menentukan prioritas usulan program pembangunan

##### **b. LKSMD sebagai Mediator**

- 1) Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan
- 2) Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan

##### **c. LKSMD sebagai Motivator**

- 1) Masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun
- 2) Masyarakat ikut merawat pembangunan yang sudah dibuat

d. LKSMD sebagai Dinamisator

- 1) LKSMD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan
- 2) LKSMD melakukan evaluasi pada program pembangunan

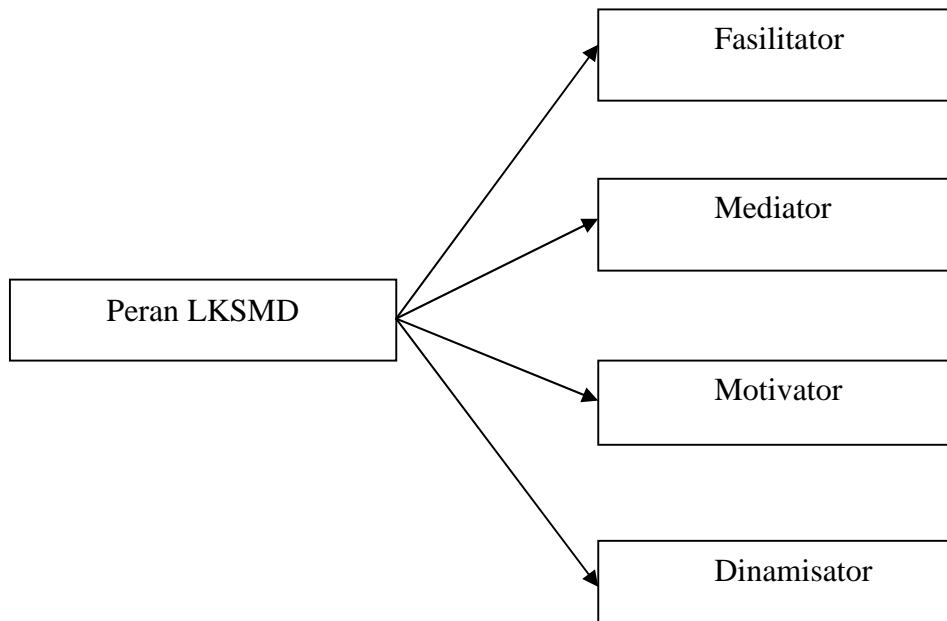
#### **D. Kerangka Konsep**

Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) adalah lembaga atau wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dengan berupaya mewujudkan masyarakat yang partisipatif.

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa difasilitasi oleh Kepala Desa dengan motor penggerak adalah Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dan partisipasi masyarakat. Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang tujuan pembentukannya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mendukung program pembangunan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan. Tingkat partisipasi pembangunan di suatu desa dapat dikatakan sangat juga dipengaruhi oleh sejauh mana kinerja pengurus LKSMD dan partisipasi masyarakat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung program yang

direncanakan, dan juga harus terciptanya hubungan yang harmonis antara LKSMD dengan Kepala Desa, serta organisasi-organisasi yang ada di desa.

**Gambar 1**  
**Kerangka Konsep**



*Sumber: Singarimbun, 2008*

### **E. Pertanyaan Penelitian**

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, peneliti mendiskripsikan secara terperinci dan mendalam mengenai peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang.

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) sebagai fasilitator dalam mendukung kelancaran pembangunan desa di Desa Buntu Pema, Kec. Curio, Kab. Enrekang?

2. Bagaimanakah Peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) sebagai mediator dalam mendukung kelancaran pembangunan desa di Desa Buntu Pema, Kec. Curio, Kab. Enrekang?
3. Bagaimanakah Peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) sebagai motivator dalam mendukung kelancaran pembangunan desa di Desa Buntu Pema, Kec. Curio, Kab. Enrekang?
4. Bagaimanakah Peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) sebagai dinamisator dalam mendukung kelancaran pembangunan desa di Desa Buntu Pema, Kec. Curio, Kab. Enrekang?



## **BAB III**

### **DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu teknik dan prosedur yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan pendapat tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan alasan bahwa gejala-gejala, informasi, keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan data dari hasil pengamatan selama berprosesnya penelitian peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMMD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang ini akan lebih tepat bila diungkapkan dalam bentuk kata-kata.

#### **B. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penilaian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti secara sistematis. Pendekatan kualitatif menyajikan data yang mengumpulkan terutama dalam bentuk kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi. Jadi, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang studi kasusnya mengarah pada deskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan (H.B Sutopo, 2002).

Dengan demikian metode ini merumuskan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, dan mencoba menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

### **C. Sumber Data**

Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus LKSMD, Pengurus Desa dan warga masyarakat Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Untuk mendukung keabsahan data peneliti melakukan triangulasi data. Sedangkan obyek penelitiannya adalah peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang.

Informan adalah seorang yang dapat memberikan informasi guna memecahkan masalah yang diajukan dan diungkap. Informan merupakan individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk keperluan informasi, yaitu orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti. Informan ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya dan mengetahui tentang kajian dalam skripsi tetapi tidak menjadi narasumber kunci dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain: Kepala Desa, Ketua RT, Tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1) Kepala Desa     | : 1 Orang |
| 2) Sekretaris Desa | : 1 Orang |
| 3) Ketua RW        | : 1 Orang |

4) Bendahara LKSMD	: 1 Orang
5) Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi LKSMD	: 1 Orang
6) Tokoh masyarakat	: 1 Orang
7) Masyarakat Umum	: 3 Orang
<hr/>	
<b>Total</b>	<b>: 9 Orang</b>

#### **D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

##### **1. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Metode pengumpulan data primer yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan :

- 1) Wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi atau data dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Namun, teknik wawancara dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet (Suyanto,2005).
- 2) Pengamatan (Observasi). Pengamatan dalam kamus berarti melihat dengan penuh penelitian. Dalam hal pengamatan, apa yang diamati, siapa yang mengamati, kesalahan-kesalahan apa saja yang sering terjadi pada waktu pengamatan perlu diketahui oleh peneliti sebelum melakukan tahap-tahapan penelitian (Suyanto, 2005).

- b. Metode penelitian data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung dari objek penelitian yang terdiri dari :
- 1) Penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan literature seperti buku, karya ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber bacaan lainnya.
  - 2) Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang menggunakan catatan-catatan dan rekaman video yang ada dilokasi penelitian atau pada sumber-sumber lain yang terkait dengan obyek penelitian.

## **2. Instrumen Pengumpulan Data**

### **PEDOMAN TELAAH DOKUMEN**

- a. 1. Identitas tempat : Desa Buntu Pema
2. Alamat : Desa Buntu Pema, Kec. Curio,  
Kab. Enrekang
3. Waktu pengambilan dokumen: 5 September 2017 – 30 September
- b. Struktur organisasi desa Buntu Pema
- c. Dokumen yang berhubungan dengan strategi perencanaan pembangunan desa:
  1. Dokumen/ arsip yang berhubungan dengan perencanaan .  
pembangunan di desa Buntu Pema.
  2. Dokumen/foto-foto pelaksanaan pembangunan di desa Buntu  
Pema.

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

Menurut Miles dan Haberman (dalam Sugiono 2005) terdapat beberapa langkah yang harus dilalui dalam melakukan analisis yaitu :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Setelah langkah pertama selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengujikan data dalam penelitian dengan teks yang bersifat naratif sehingga memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## F. Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan uji *confirmability* (obyektivitas). Dalam hal ini, karena penelitian yang digunakan adalah studi kasus data tunggal, maka peneliti hanya menguji validitas dan reliabilitasnya dengan tiga uji, yaitu:

## 1. Uji Kredibilitas (Validitas Internal)

Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dan membercheck.

### a. Perpanjangan Pengamatan

Dalam penelitian ini diperpanjang sampai dengan beberapakali, yaitu wawancara dilakukan lebih dari sekali. Wawancara tidakhanya dilakukan dengan subyek, tetapi juga dilakukan dengan beberapainforman (*signifikant other*). Hal itu juga dilakukakan beberapa kali. Hal ini dikarenak kondisi subyek yang sangat tidak stabil, sehingga perlu wawancara mendalam yang pelaksanaannya tidak cukup hanyasatu kali.

Begitu juga pada tahap observasi. Observasi yang diulang sebanyak 5 kali, melalui observasi intens. Artinya observasi dilakukan dengan waktu yang cukup dalam satu harinya. Baik itu saat pagi hari, siang hari atau pun malam hari.

### b. Peningkatan Ketekunan

Pengujian kredibilitas berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara lebih cermat, sehingga diketahui kesalahan dan kekurangannya. Hal ini dilakukan dengan memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

### c. Triangulasi

Hal ini dilakukan dengan triangulasi teknik, triangulasi waktu dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi pada sumber data primer.

Triangulasi waktu artinya pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan, yaitu pagi, siang dan sore hari. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber data yang berbeda, yaitu selain wawancara dilakukan dengan subyek, kami juga menanyakan hal yang sama dengan orang terdekat subyek yaitu istri subyek dan sahabat subyek.

#### **d. Analisis Kasus Negatif**

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis kasus negatif yang berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Jika dalam penelitian ini terdapat beberapa kasus negatif yang telah ditemukan, akan ditanyakan kembali kepada sumber data sehingga mendapat kesepakatan dan data menjadi tidak berbeda. Namun jika dari beberapa nara sumber memberikan data yang sama, maka data telah kredibel.

#### **e. Menggunakan Bahan Referensi**

Dalam penelitian ini, untuk mendukung dan membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, kami akan memberikan data dokumentasi berupa foto-foto hasil observasi.

## **2. Uji Transferability (Validitas Eksternal)**

Transeferability menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini untuk selanjutnya dapat diterapkan, maka pembuatan laporan ini akan dibuat secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Bila dalam hal ini pembaca memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya tentang "semacam apa" hasil penelitian ini dapat diberlakukan, maka laporan ini telah memenuhi standar transeferability (Sanafiah Faisal, 1990).

### **3. Uji Dependability (Reliabilitas)**

Dependability disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam hal ini, uji dependability ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat "jejak aktivitas lapangan" atau "*fieldnote*" yang akan dilampirkan pada halaman belakang laporan yang isinya meliputi bagaimana peneliti mulai menentukan fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai dengan membuat kesimpulan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis**

Desa Buntu Pema merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Curio, Daerah Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan dengan pusat pemerintahan di Dusun Pelali. Mengingat Dusun Pelali terletak ditengah-tengah wilayah Desa Buntu Pema maka akan memudahkan dalam menjalankan roda pemerintahan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat se-Desa Buntu Pema. Konon menurut cerita bahwa di jaman dahulu Kepala Desa atau Lurah Desa merupakan orang yang disegani masyarakat karena Kepala Desa Buntu Pema terdahulu merupakan kepala desa yang sangat bewibawa, dihormati dan disegani.

Letak geografis Desa Buntu Pema berada di wilayah utara Kabupaten Enrekang.

Adapun batas wilayah Desa Buntu Pema adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mandalan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekkala.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Salassa.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumbang.

Secara geografis Desa Buntu Pema merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan, yakni didominasi dengan dataran tinggi dengan

kondisi tanah yang sebagian besar berpasir dan berbatu. Desa Buntu Pema sendiri memiliki iklim tropis yaitu musim kemarau dan musim hujan.

## **2. Keadaan Demografis**

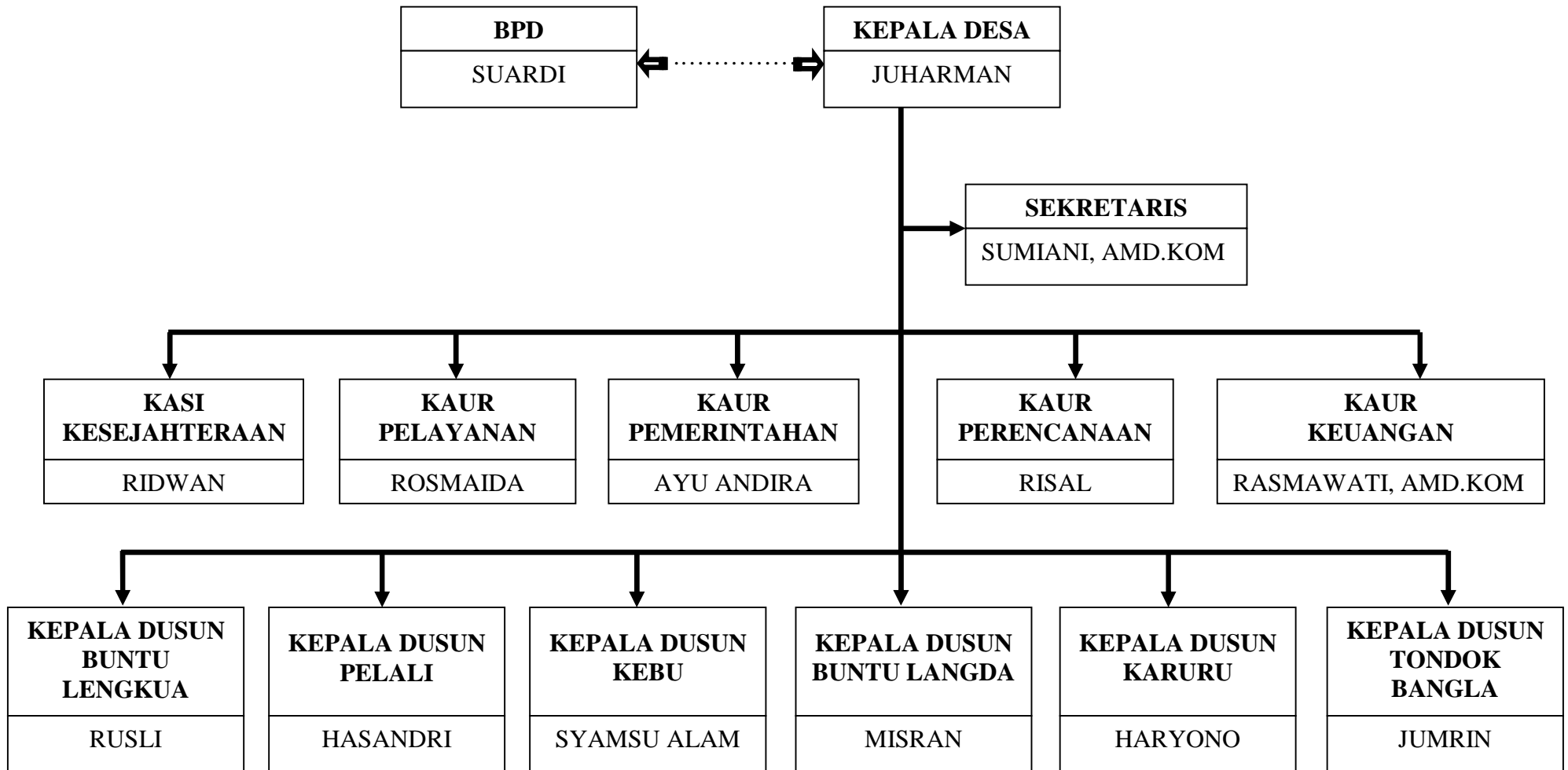
Desa Buntu Pema memiliki luas wilayah 4922 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 2.222 jiwa penduduk tetap dengan jumlah kepala keluarga 535, penduduk laki-laki sebanyak 1.326 jiwa dari seluruh jumlah penduduk sementara penduduk perempuan sebanyak 896 dari seluruh jumlah penduduk.. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini.

Masyarakat Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang 100% beragama Islam. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan peternak.

## **3. Struktur Organisasi Desa Buntu Pema:**

## Struktur Organisasi

### Pemerintah Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang



#### 4. **Gambaran Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD)**

Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) merupakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan. Sumber dana yang digunakan dalam kegiatan Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa di Desa Buntu Pema berasal dari dana operasional bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Enrekang.

#### 5. **Kepengurusan LKSMD**

Keputusan Desa Buntu Pema Nomor 11 tahun 2016 mengenai kepengurusan LKSMD masyarakat Desa Buntu Pema Kecamatan Curio. Berikut ini struktur kepengurusan LKSMD tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KERJA SWADAYA MASYARAKAT  
DESA (LKSMD)  
DESA BUNTU PEMA MASA BAKTI  
TAHUN 2016-2021**

KETUA	: SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA	: LIANTO
SEKERTARIS	: SABIL
WAKIL SEKERTARIS	: WANIR
BENDAHARA	: JUSDIN
SEKSI-SEKSI	:
1. SEKSI AGAMA	:
KETUA	: GULING
ANGGOTA	: 1. SIRAN

2. JAHARUDDIN

3. SUHALI

4. SUHADI

2. SEKSI KANTIBMAS:

KETUA : LAHAYU

ANGGOTA :1. RAHANI

2. MAYANG

3. KASMAN

4. RAYONG

3. SEKSI PENDIDIKAN DAN PENERANGAN:

KETUA : SUHIDA

ANGGOTA :1. JURLIA

2. SUHIDA

3. NAWATI

4. LODDING

4. SEKSI LINGKUNGAN HIDUP:

KETUA : JASMAN

ANGGOTA :1. MUSLIMIN

2. MUSTAMIN

3. RAYU

4. SUDIRMAN

5. SEKSI KESEHATAN, KEPENDUDUKAN & KB :

KETUA : JUMRIANI

ANGGOTA :1. RAYA

2. JASMAN

3. ALMIATI

4. HAMMA

6. SEKSI PEMB. PEREKONOMIAN DAN KOPERASI:

KETUA : GASALI

ANGGOTA :1. BASIR

2. TALARA

3. LANDING

4. JUMADAN

7. SEKSI PEMUDA, OLAHRAGA & KESENIAN:

KETUA : JADIR

ANGGOTA :1. MARDANI

2. ASMAN

3. MAWAN

4. BASRI

8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL:

KETUA : PTANGGAI

ANGGOTA :1. RIDWAN

2. BAHTIAR

3. SATTU

4. HARYONO

9. SEKSI PKK:

KETUA : RISNAWATI

ANGGOTA :1. HAMISA

2. HADARIA

3. MUSDALIFA

4. JULIANI

5. HAMIRA

## B. Karakteristik Sumber Data

### 1. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Buntu Pema pada tahun 2017 sebanyak 2.222 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 535, penduduk laki-laki sebanyak 1.326 jiwa atau 59,7% dari seluruh jumlah penduduk sementara penduduk perempuan sebanyak 896 atau 40,3% dari seluruh jumlah penduduk. Dimana, balita sebanyak 152 jiwa, usia sekolah sebanyak 391 jiwa, usia kerja sebanyak 1.570 jiwa, dan lanjut usia sebanyak 109 jiwa.

**Tabel**  
**Jumlah Penduduk Desa Buntu Pema**

No	Kategori Penduduk	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	1.326	59,7%
2.	Perempuan	896	40,3%
<b>Total</b>		<b>2.222</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Profil Desa Buntu Pema 2017*

### 2. Usia

Struktur umur penduduk penting untuk diketahui karena struktur umur penduduk dapat memberikan petunjuk penting dalam pelaksanaan pembangunan misalnya dengan mengetahui struktur umur, kita dapat mengetahui penduduk usia sekolah dan jumlah tenaga kerja. Struktur umur penduduk Desa Buntu Pema disajikan pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Kelompok Usia Desa Buntu Pema**

No	Kelompok Usia	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Usia Balita	152	6,8%
2.	Usia Sekolah	391	17,6%
3.	Usia Kerja	1.570	70,7%
4.	Usia Lanjut	109	4,9%
<b>Total</b>		<b>2.222</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Profil Desa Buntu Pema 2017*

Tabel diatas memberikan gambaran mengenai keadaan serta perkembangan penduduk di Desa yang bersangkutan, nampak bahwa usia kerja merupakan kelompok usia terbanyak dibanding kelompok usia lainnya yaitu 1.570 atau 70,7 persen sedangkan kelompok usia paling sedikit adalah usia lanjut yaitu 109 atau 4,9%.

### 3. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam perekonomian dan pembangunan disuatu daerah dan sekaligus dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa, bahwa sangat penting dalam memberantas kemiskinan. Pendidikan berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), semakin tinggi tingkat kualitas SDMnya, suatu daerah cenderung akan memiliki tingkat kemajuan pembangunan yang lebih tinggi. Sebaran penduduk Desa Buntu Pema menurut tingkat pendidikan disajikan berikut:



**Tabel**  
**Tingkat Pendidikan Desa Buntu Pema**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Buta Aksara	338	15,2%
2.	Tidak Tamat SD	767	34,5%
3.	Tamat SD	627	28,3%
4.	Tamat SMP	305	13,7%
5.	Tamat SMA	115	5,2%
6.	D-3	45	2,0%
7.	S-1	25	1,1%
<b>Total</b>		<b>2.222</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Profil Desa Buntu Pema 2017*

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Buntu Pema relatif bervariasi, buta aksara sebanyak 338 orang atau 15,2%, tidak tamat SD sebanyak 767 orang atau 34,5%, tamat SD sebanyak 627 orang atau 28,3 persen, tamat SMP sebanyak 305 orang atau 13,7%, tamat SMA sebanyak 115 orang atau 5,2%, jenjang pendidikan D-3 sebanyak 45 orang atau 2,0% dan masyarakat yang berpendidikan Sarjana sebanyak 25 orang atau 1,1 persen saja. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Buntu Pema masih rendah.

Masih relatif rendahnya tingkat pendidikan formal penduduk pada lokasi penelitian, juga ditunjukkan tidak adanya masyarakat yang pernah mengikuti pendidikan non formal seperti kursus atau pelatihan. Hal tersebut disebabkan sibuknya masyarakat dalam melakukan aktivitas

sehari-hari sehingga tidak ada waktu untuk meningkatkan keterampilan melalui kursus-kursus, demikian juga tidak pernah ada program pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

### C. Paparan dan Reduksi Data

1. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang difasilitasi oleh LKSMD?"

*“Masyarakat yang ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan hanya 40% saja, karena di Desa Buntu Pema sendiri kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai petani”. (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017, Ibu Sumiani, Amd.Kom, Sekertaris Desa Buntu Pema)*

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat di ajak dalam mengikuti rapat yang diadakan oleh LKSMD di Desa Buntu Pema? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan dari pertanyaan yang sama yaitu sebagai berikut:

*“Selama ini pihak LKSMD selalu mengundang masyarakat setiap diadakan rapat, namun banyak yang tidak bisa hadir dalam acara rapat tersebut. Hal ini disebabkan karena faktor kerjaan yang mungkin tidak bisa mereka tinggalkan”. (wawancara 9 Oktober 2017, Bapak Jusdin, Bendahara LKSMD Desa Buntu Pema)*

3. Menurut Bapak/Ibu sudah adakah kesadaran masyarakat untuk ikut dalam memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan? Adapun jawaban yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

*“Masyarakat kadang tidak mau memberikan informasi langsung pada saat rapat. Akan tetapi ada juga sebagian dari masyarakat tersebut memberikan informasi yang mereka lihat mengenai program pembangunan yang berjalan melalui RT/RW setempat”(wawancara 10 Oktober 2017, Ibu Sumiani, Amd.Kom, Sekertaris Buntu Pema)*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

*“Informasi dari masyarakat mengenai berjalannya pembangunan tersebut dirasakan sangat penting ya. Semuanya untuk memperlancarkan pembangunan yang sedang berjalan”. (wawancara tanggal 11 Oktober 2017, Bapak Juamin, RW Desa Buntu Pema).*

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pemanfaatan masyarakat terhadap pembangunan yang ada di Desa Buntu Pema? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

*“Masyarakat sangat memanfaatkan pembangunan yang ada. Karena menguntungkan bagi mereka”. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan Bapak Gasali, Seksi pembangunan perekonomian dan koperasi LKSMD Desa Buntu Pema).*

5. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah menurut Bapak/Ibu keikutsertaan masyarakat dalam merawat pembangunan yang sudah ada di Desa Buntu Pema?”. Adapun jawaban yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

*“Hanya 30% yang ikut merawat, selebihnya hanya menikmati saja tanpa ikut merawat”. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan Ibu Sumiani, Amd.Kom, Sekertaris desa, Desa Buntu Pema).*

6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai pemantauan dan pengawasan dari pihak LKSMD terhadap kegiatan program pembangunan? Adapun jawaban yang di peroleh peneliti dari hasil wawancara beberapa informan sebagai berikut:

*“Mereka ikut memantau serta mengawasi pembangunan yang sedang berjalan”. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan Bapak Gasali, Seksi pembangunan perekonomian dan koperasi LKSMD Desa Buntu Pema).*

7. Menurut Bapak/Ibu apakah LKSMD melakukan evaluasi pembangunan pembangunan? Jelaskan! Adapun jawaban yang di peroleh peneliti dari beberapa informan sebagai berikut:

*“Evaluasi tiap tahun selalu dilakukan, malah dijadikan hal yang penting tiap tahunnya, supaya mengetahui kondisi pembangunan baik itu fisik maupun non fisik. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan dengan Bapak Gasali, Seksi pembangunan perekonomian dan koperasi LKSMD Desa Buntu Pema).*

#### **D. Hasil Analisis Data**

##### **1. Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) sebagai Fasilitator.**

Berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator didalamnya sebagai berikut :

###### **a. Masyarakat ikut merencanakan pembangunan**

Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang di fasilitasi oleh LKSMD?” ada pun jawaban yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

*“Masyarakat yang ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan hanya 40% saja, karena di Desa Buntu Pema sendiri kebanyakan penduduknya berforesi sebagai petani”. (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017, Ibu Sumiani, Amd.Kom, Sekertaris Desa Buntu Pema)*

Wawancara diatas bisa kita lihat masih kurangnya partisipasi masyarakat yang ada, sehingga akan mengurangi efesiensi waktu khususnya dalam memberdayakan masyarakat. Padahal tujuan dari perencanaan ini sendiri merupakan untuk kemajuan masyarkat yang ada di Desa Buntu Pema. Hal yang menyebabkan kurangnya partisipasi

masyarakat dikarenakan penduduk setempat lebih banyak berprofesi sebagai petani dan pedagang, sehingga mereka lebih memilih untuk berdagang dari pada berpartisipasi.

## **2. Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) sebagai Mediator**

Berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator didalamnya sebagai berikut :

### **a. Masyarakat Ikut Dalam Rapat yang Diadakan**

Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat di ajak dalam mengikuti rapat yang diadakan oleh LKSMD di Desa Buntu Pema? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan dari pertanyaan yang sama yaitu sebagai berikut:

*“Selama ini pihak LKSMD selalu mengundang masyarakat setiap diadakan rapat, namun banyak yang tidak bisa hadir dalam acara rapat tersebut. Hal ini di sebabkan karena faktor kerjaan yang mungkin tidak bisa mereka tinggalkan”. (wawancara 9 Oktober 2017, Bapak Jusdin, Bendahara LKSMD Desa Buntu Pema)*

Hasil wawancara Bapak Jusdin bisa dilihat bahwa beliau sering menghadiri rapat yang diadakan pihal LKSMD, tujuan beliau ikut pastinya supaya bisa mengusulkan apa-apa saja yang menjadi kegiatan prioritas yang akan dilakukan di Desa Buntu Pema.

### **b. Masyarakat Ikut Memberikan Informasi Bagi Berjalannya Program Pembangunan**

Menurut Bapak/Ibu sudah adakah kesadaran masyarakat untuk ikut dalam memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan? Adapun jawaban yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

*“Masyarakat kadang tidak mau memberikan informasi langsung pada saat rapat. Akan tetapi ada juga sebagian dari masyarakat tersebut memberikan informasi yang mereka lihat mengenai program pembangunan yang berjalan melalui RT/RW setempat”(wawancara 10 Oktober 2017, Ibu Sumiani, Amd.Kom, Sekertaris Buntu Pema)*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

*“Informasi dari masyarakat mengenai berjalannya pembangunan tersebut dirasakan sangat penting ya. Semuanya untuk memperlancarkan pembangunan yang sedang berjalan”. (wawancara tanggal 11 Oktober 2017, Bapak Juamin, RW Desa Buntu Pema).*

Hasil wawancara diatas bisa kita lihat masyarakat sebenarnya sudah mau untuk ikut berpartisipasi, namun mereka masih belum mau terbuka. Padahal partisipasi mereka sendiri sangat berpengaruh untuk kemajuan pembangunan.

### **3. Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) sebagai Motivator**

Berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator didalamnya sebagai berikut :

#### **a. Masyarakat Memanfaatkan Pembangunan yang Sudah Dibangun**

Menurut Bapak/Ibu bagaimana pemanfaatan masyarakat terhadap pembangunan yang ada di Desa Buntu Pema? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

*“Masyarakat sangat memanfaatkan pembangunan yang ada. Karena menguntungkan bagi mereka”. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan Bapak Gasali, Seksi pembangunan perekonomian dan koperasi LKSMD Desa Buntu Pema).*

**b. Masyarakat Ikut Merawat Pembangunan yang Sudah Ada.**

Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah menurut Bapak/Ibu keikutsertaan masyarakat dalam merawat pembangunan yang sudah ada di Desa Buntu Pema?”. Adapun jawaban yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

*“Hanya 30% yang ikut merawat, selebihnya hanya menikmati saja tanpa ikut merawat”. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan Ibu Sumiani, Amd.Kom, Sekertaris desa, Desa Buntu Pema).*

**4. Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa sebagai Dinamisator**

Berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator didalamnya sebagai berikut :

**a. LKSMD Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Program Pembangunan**

Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai pemantauan dan pengawasan dari pihak LKSMD terhadap kegiatan program pembangunan? Adapun jawaban yang di peroleh peneliti dari hasil wawancara beberapa informan sebagai berikut:

*“Mereka ikut memantau serta mengawasi pembangunan yang sedang berjalan”. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan Bapak Gasali, Seksi pembangunan perekonomian dan koperasi LKSMD Desa Buntu Pema).*

**b. LKSMD Melakukan Evaluasi pada Program Pembangunan.**

Menurut Bapak/Ibu apakah LKSMD melakukan evaluasi pembangunan pembangunan? Jelaskan! Adapun jawaban yang di peroleh peneliti dari beberapa informan sebagai berikut:

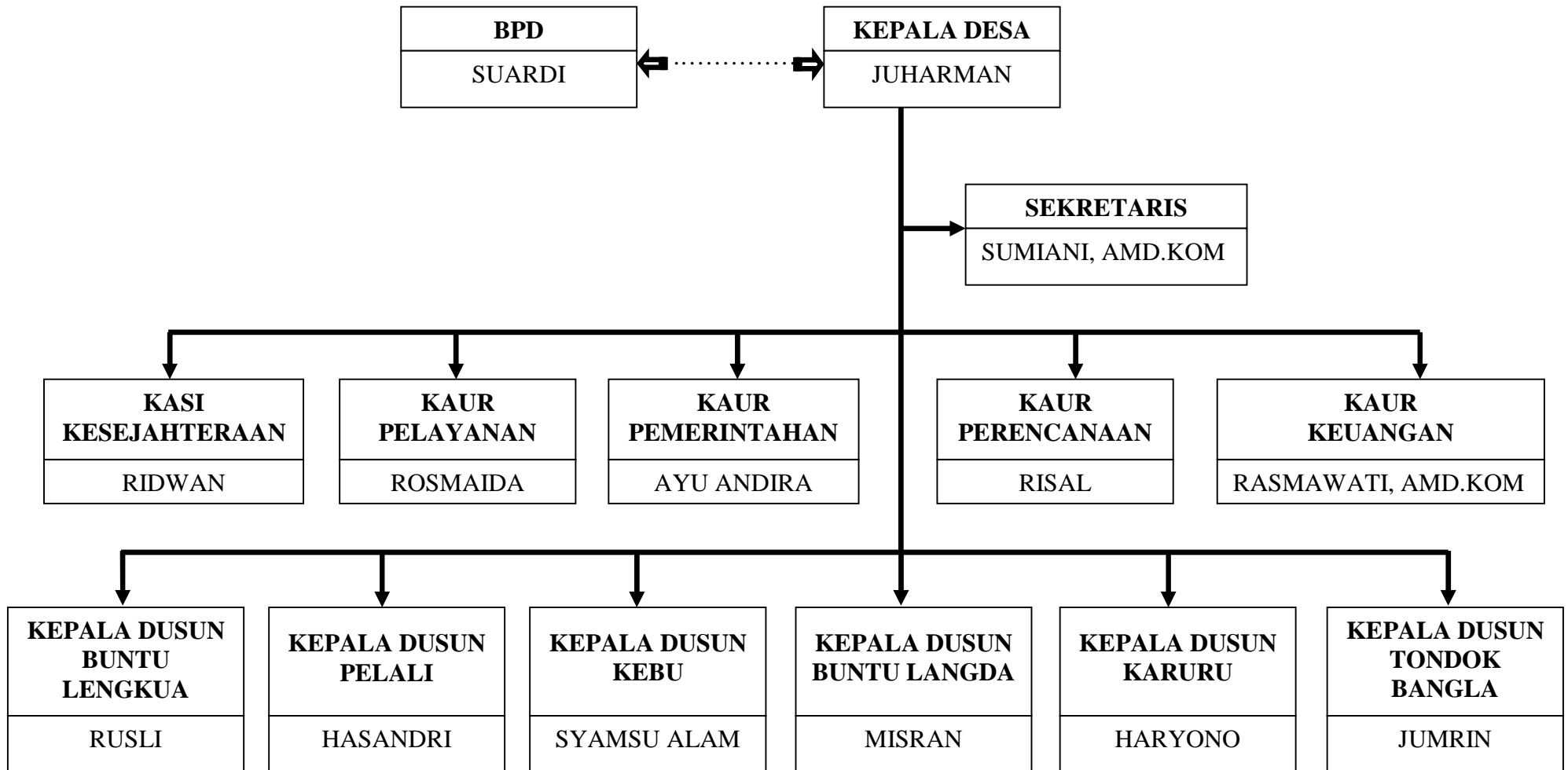
*“Evaluasi tiap tahun selalu dilakukan, malah dijadikan hal yang penting tiap tahunnya, supaya mengetahui kondisi*

*pembangunan baik itu fisik maupun non fisik. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan dengan Bapak Gasali, Seksi pembangunan perekonomian dan koperasi LKSMD Desa Buntu Pema).*



## Struktur Organisasi

### Pemerintah Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang



## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peran LKSMD (Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa) dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio.**

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk memandirikan masyarakat, terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ ketidakberdayaan. Masalah kemiskinan sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia. Indonesia sendiri tingkat kemiskinannya sudah mencapai kurang lebih tiga perlima atau 60% dari penduduk Indonesia. Mengacu pada paradigma baru pembangunan, yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Fujikake, 2008:94), sehingga upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan. Selain itu kemiskinan bisa dilihat dari indicator pemenuhan kebutuhan dasar yang masih belum memadai/mecukupi. Kebutuhan dasar merupakan pakaian, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Sedangkan keterbelakangan produktivitas seperti lemahnya sumber daya manusia (SDM), melemahnya pasar-pasar tradisional akibat daya saing dengan pasar-pasar internasional. Dengan kata lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan cultural. (Usman, 2004:23).

Peran dari Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa di Desa Buntu Pema tersebut bisa kita lihat dari beberapa indikator pembahasan yang akan diuraikan oleh peneliti. Adapun indikator yang diuraikan berdasarkan fungsi dan perannya yaitu : Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa sebagai fasilitator, Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa sebagai mediator, Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa sebagai motivator dan Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat

Desa sebagai dinamistator bagi pembangunan di Desa tersebut. Berikut ini beberapa uraian indikator yang menjadi pembahasan untuk mengetahui seberapa besarnya peran LKSMD di Desa Buntu Pema sebagai berikut :

### **1. Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) sebagai Fasilitator**

Peran Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa yang disebut sebagai fasilitator di desa tersebut adalah LKSMD sendiri memfasilitasi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan program pembangunan LKSMD. Selain sebagai fasilitator dalam program pembangunan masyarakat, LKSMD sendiri merupakan sebagai pendamping terhadap perangkat-perangkat desa seperti RT dan RW. Adapun peran yang dijalani oleh LKSMD di Desa Buntu Pema yang di lihat langsung, sudah terlihat sebagai fasilitator dalam rancangan pembangunan masyarakat. Untuk dapat menjadikan fasilitator yang baik berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator didalamnya sebagai berikut :

#### **a. Masyarakat ikut merencanakan pembangunan**

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang nonfisik. Masyarakat dibolehkan untuk ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Desa dan mereka harus bisa bertanggungjawab

dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Desa dan seterusnya. Untuk mendapatkan data yang terpercaya, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut : Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang difasilitasi oleh LKSMD?” ada pun jawaban yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

*“Masyarakat yang ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan hanya 40% saja, karena di Desa Buntu Pema sendiri kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai petani”. (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017, Ibu Sumiani, Amd.Kom, Sekertaris Desa Buntu Pema)*

Wawancara diatas bisa kita lihat masih kurangnya partisipasi masyarakat yang ada, sehingga akan mengurangi efisiensi waktu khususnya dalam memberdayakan masyarakat. Padahal tujuan dari perencanaan ini sendiri merupakan untuk kemajuan masyarakat yang ada di Desa Buntu Pema. Hal yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan penduduk setempat lebih banyak berprofesi sebagai petani dan pedagang, sehingga mereka lebih memilih untuk berdagang daripada berpartisipasi.

#### **b. Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa**

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa merupakan bentuk tanggung jawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan

dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya pembangunan yang bersifat fisik yang dibutuhkan masyarakat setempat.

Masyarakat boleh ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan desa mereka dan juga harus bertanggungjawab dengan program yang telah mereka usulkan dalam musrenbang tingkat desa dan seterusnya. Hal senada disampaikan oleh kepala Desa Buntu Pema:

“Dalam merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa ini memang masyarakat diikut sertakan dalam mengusulkan pembangunan yang menjadi prioritas di lingkungan masing-masing karena disini Desa Buntu Pema ada lima lingkungan dan di usulkan di musrenbang desa”. (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2017).

Hal ini juga dipertegas oleh Ketua LKSMD yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat diikut sertakan dalam usulan pembangunan dan mereka juga harus bertanggung jawab atas pembangunan yang telah mereka usulkan di Desa Buntu Pema”. (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan selaku kepala desa Buntu Pema mengatakan bahwa masyarakat yang aktif seperti yang dikatakan kepala lingkungan di dalam merencanakan pembangunan akan mempercepat kemajuan pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka tidak perlu lagi di perintah terlebih dahulu demi kemajuan pembangunan di Desa Buntu Pema.

Adapun faktor pendukung yang menunjukkan bahwa masyarakat yang ikut serta aktif dalam merencanakan pembangunan yaitu tergantung pada tingkat pendidikan masyarakat dan utamanya kesadaran atau kemauan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan. Kesadaran atau kemauan masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat

dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorong untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan utamanya dari kemauan dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Kemudian tingkat pendidikan masyarakat yaitu salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan adalah pendidikan, karena pendidikan dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka memiliki perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Melalui pendidikan yang tinggi maka masyarakat akan mengerti pentingnya pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan dan mereka akan terlibat langsung dalam pembangunan tersebut. Masyarakat yang aktif di Desa Buntu Pema ternyata tidak semua yang memiliki keaktifan yang sama karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang lain yang menyatakan bahwa:

“Iya saya tahu kalau ada musrenbang di desa, tapi saya tidak ikut dalam rapat itu karena saya ikut saja dengan apa keputusan dari pihak desa”. (Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan selaku masyarakat di Desa Buntu Pema bahwa masyarakat di Desa Buntu Pema kurang peduli terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka hanya mengikuti apa hasil keputusan musrenbang tanpa ikut serta dalam musrenbang desa tersebut. Terkait dengan pernyataan dari masyarakat seperti diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat di Desa Buntu Pema masih kurang kesadarannya dari masing-masing individu, apalagi dengan zaman sekarang gotong

royong dan kebersamaan sudah sangat berkurang, karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing.

Hal ini berdasarkan wawancara bersama salah seorang masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“wajar kalau partisipasi masyarakat disini kurang karena menurut saya setiap orang memiliki kepentingan masing-masing. Seperti sibuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya”. (Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2017).

Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya kesadaran atau kemauan masyarakat akan pentingnya gotong royong dalam suatu kegiatan pembangunan, juga tingkat pendidikan masyarakat yang rendah maka mereka sulit untuk mengerti apa pentingnya pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan. Karena dari ketidaktahuan itulah yang menyebabkan masyarakat memiliki sikap acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan.

Jadi, peran Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa sebagai fasilitator melalui LKSMD Desa Buntu Pema sangat rendah hal ini menunjukkan masyarakat yang kurang aktif dan memiliki kesadaran rendah untuk merencanakan pembangunan hal ini disebabkan dari kurangnya minat masyarakat.

### **c. Masyarakat Ikut Dalam Merencanakan Prioritas Usulan**

Program Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan ditingkat desa. Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masing-

masing desa untuk dilaksanakan. Melalui usulan program yang disampaikan oleh masyarakat kepada forum musyawarah akan ditindak lanjuti melalui musyawarah prioritas usulan di tingkat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Untuk memperoleh informasi yang jelas maka hal mengenai prioritas penyelenggaraan program pemerintah yang akan dilaksanakan di Desa Buntu Pema maka hal ini dijelaskan dalam wawancara bersama tokoh masyarakat Desa Buntu Pema bahwa:

“Yang saya lakukan dalam penyelenggaraan prioritas program pembangunan hanya untuk kepentingan masyarakat disini”. (Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan selaku masyarakat (kepala sekolah) di Desa Buntu Pema bahwa masyarakat yang memiliki rasa peduli dengan kemajuan pembangunan dapat ditunjukkan dengan keikutsertaannya di dalam memberikan usulan program LKSMD antara lain dengan ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat yaitu dengan hadir ketika rapat diadakan yaitu musrenbang Desa Buntu Pema Kecamatan Curio. Selanjutnya wawancara dengan pak Desa yang menyatakan bahwa:

“Penentuan prioritas dapat dilihat dulu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang diprioritaskan untuk kepentingan bersama dan kemudian melihat apa-apa saja yang sudah diprogramkan oleh pemerintah setelah itu kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Buntu Pema. Kemudian program prioritas dalam Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa memang dilakukan setahun sekali dalam rapat musrenbang ditingkat desa”.(Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas kemudian ditambahkan oleh tokoh masyarakat bahwa:



“Memang program yang dijadikan sebagai prioritas di desa ini sangat dibutuhkan tetapi terkadang masyarakat tidak ada komentar dengan program LKSMD, karena sebenarnya LKSMD di desa ini kurang berperan disebabkan apabila ada bantuan dari pemerintah dialihkan ke pihak ketiga yaitu kontraktor pihak itulah yang mengerjakan yang seharusnya menjadi kewenangan LKSMD mengapa demikian karena disinilah kelemahan ketua LKSMD yang diibaratkan tidak bisa menjemput bola dengan baik, dan ketua LKSMD itu sendiri tidak proaktif menjemput proyek, dan apabila ada proyek masuk dia tahu bahwa pengelolanya adalah kontraktor bukan organisasinya yang seharusnya menjadi tugas dari organisasinya bahkan dia terima saja tidak mengkritisnya”. (Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan selaku tokoh masyarakat di Desa Buntu Pema maka diketahui bahwa peran Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) sebagai fasilitator masih rendah sesuai aturan yang berlaku untuk LKSMD hal ini dapat dilihat dari pernyataan ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menyatakan bahwa LKSMD di Desa Buntu Pema tidak proaktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Buntu Pema karena organisasi tersebut tidak mengkritisi atas apa yang menjadi kewenangannya, dan sebagian besar masyarakatnya juga tidak banyak komentar dengan pelaksanaan pembangunan.

## **2. Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) sebagai Mediator**

Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) yang dianggap sebagai mediator dalam pembangunan yaitu LKSMD sendiri yang memiliki tugas untuk mensosialisasikan beberapa hasil usulan dari rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan akan dijadikan pembangunan jangka menengah kepada warga masyarakat. Untuk

LKSMD Desa Buntu Pema sendiri mensosialisasikan rancangan pembangunan pada saat melakukan pertemuan-pertemuan yang nantinya akan diambil beberapa menit untuk mensosialisasi program-program pembangunan tersebut. Adapun hal yang menjadi penghambat dari program tersebut biasanya dikarenakan faktor dari geografis. Untuk dapat menjadikan mediator yang baik, berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator didalamnya sebagai berikut:

**a. Masyarakat Ikut dalam Rapat yang Diadakan**

LKSMD merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan terlihat jelas peran LKSMD seperti apa jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat sendiri dalam kegiatan yang dilakukan oleh LKSMD. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan seperti rapat, maka program kebijakan pemerintah yang melalui LKSMD tersebut tidak mungkin bisa bergerak, hal itu disebabkan tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi. Namun tujuan dari LKSMD sendiri adalah untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat yang ada, baik itu di desa maupun di Kelurahan. Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai partisipasi masyarakat yang ikut dalam rapat yang diadakan LKSMD Desa Buntu Pema, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat di ajak dalam mengikuti rapat yang diadakan oleh LKSMD di Desa Buntu Pema? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan dari pertanyaan yang sama yaitu sebagai berikut:

*“Selama ini pihak LKSMD selalu mengundang masyarakat setiap diadakan rapat, namun banyak yang tidak bisa hadir dalam acara*

*rapat tersebut. Hal ini di sebabkan karena faktor kerjaan yang mungkin tidak bisa mereka tinggalkan". (wawancara 9 Oktober 2017, Bapak Jusdin, Bendahara LKSMD Desa Buntu Pema)*

Hasil wawancara Bapak Jusdin bisa dilihat bahwa beliau sering menghadiri rapat yang diadakan pihak LKSMD, tujuan beliau ikut pastinya supaya bisa mengusulkan apa-apa saja yang menjadi kegiatan prioritas yang akan dilakukan di Desa Buntu Pema.

#### **b. Masyarakat Ikut Memberikan Informasi Bagi Berjalannya Program Pembangunan**

Informasi pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi LKSMD, apalagi yang bersifat membangun. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan diharapkan bisa memberikan informasi mengenai jalannya pembangunan dibuat oleh LKSMD Desa Buntu Pema. Adapun kegiatan pembangunan yang yang direncanakan dan sedang berjalan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya informasi dari masyarakat. Baik menyampaikan melalui rapat, maupun hanya melalui RT/RW setempat. Namun pada saat rapat yang diadakan barulah RT/RW menyampaikan informasi yang di dapatkan dari masyarakat. Selain itu masyarakat yang mengikuti rapat juga memberikan informasi kepada LKSMD Desa Buntu Pema. Untuk mendapatkan informasi yang jelas, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: Menurut Bapak/Ibu sudah adakah kesadaran masyarakat untuk ikut dalam memberikan informasi bagi jalannya program pembangunan? Adapun jawaban yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

*“Masyarakat kadang tidak mau memberikan informasi langsung pada saat rapat. Akan tetapi ada juga sebagian dari masyarakat tersebut memberikan informasi yang mereka lihat mengenai program pembangunan yang berjalan melalui RT/RW setempat”. (wawancara 10 Oktober 2017, Ibu Sumiani, Amd.Kom, Sekertaris Buntu Pema)*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

*“Informasi dari masyarakat mengenai berjalannya pembangunan tersebut dirasakan sangat penting ya. Semuanya untuk memperlancarkan pembangunan yang sedang berjalan”. (wawancara tanggal 11 Oktober 2017, Bapak Juamin, RW Desa Buntu Pema).*

Hasil wawancara diatas bisa kita lihat masyarakat sebenarnya sudah mau untuk ikut berpartisipasi, namun mereka masih belum mau terbuka. Padahal partisipasi mereka sendiri sangat berpengaruh untuk kemajuan pembangunan.

### **3. Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) sebagai Motivator**

Motivator merupakan orang atau kelompok yang mampu membuatkan orang lain untuk bisa melakukan sesuatu. Didalam LKSMD sangat dibutuhkan motivator yang bisa mendorong masyarakat yang ada di Desa untuk bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang sesuai keinginan masyarakat. Sehingga tantangan untuk LKSMD Desa Buntu Pema sendiri merupakan cara membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat yang bisa memotivasi masyarakat di Desa Buntu Pema. Berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator didalamnya sebagai berikut :

**a. Masyarakat Memanfaatkan Pembangunan yang Sudah Dibangun**

Pembangunan di Desa akan terwujud apabila ada kerjasama antara Lembaga bersangkutan dan masyarakat. Karena tugas LKSMD sendiri merupakan untuk mensejahterakan masyarakat dan tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Masalah pembangunan yang ada di desa Desa Buntu Pema sendiri sudah mulai maksimal karena sudah mulai ada kerjasama antara masyarakat dan LKSMD. Akan tetapi masih ada kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat yang diperlukan adalah mengikuti kegiatan LKSMD seperti ikut bekerja baik itu dibidang fisik maupun nonfisik yang ada didaerah masing-masing. Untuk memperoleh data berkaitan mengenai permasalahan tersebut peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan, dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: menurut Bapak/Ibu bagaimana pemanfaatan masyarakat terhadap pembangunan yang ada di Desa Buntu Pema? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

*“Masyarakat sangat memanfaatkan pembangunan yang ada. Karena menguntungkan bagi mereka”. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan Bapak Gasali, Seksi pembangunan perekonomian dan koperasi LKSMD Desa Buntu Pema).*

**b. Masyarakat Ikut Merawat Pembangunan yang Sudah Ada.**

Merawat pembangunan yang ada di desa merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh masyarakat setempat agar pembangunang tersebut terawat dan tidak mudah rusak. Adapun pembangunan yang diberikan oleh pemerintah merupakan perwujudan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan partisipasi dari

masyarakat untuk menjaga dan merawat pembangun yang sudah ada, maupun pembangunan yang masih dalam proses perencanaan. Pembangunan yang ada di Desa Buntu Pema yang bisa masyarakat rasakan manfaatnya seperti fasilitas di pasar, perbaikan jalan, WC umum dan lain sebagainya. Jika fasilitas ini bisa dijaga dan dirawat oleh masyarakat setempat, maka pembangunan akan bertahan dalam jangka panjang. Untuk mendapatkan data yang lebih terpercaya, peneliti langsung melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan sebagai berikut :

Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah menurut Bapak/Ibu keikutsertaan masyarakat dalam merawat pembangunan yang sudah ada di Desa Buntu Pema?”. Adapun jawaban yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

*“Hanya 30% yang ikut merawat, selebihnya hanya menikmati saja tanpa ikut merawat”. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan Ibu Sumiani, Amd.Kom, Sekertaris desa, Desa Buntu Pema).*

#### **4. Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa sebagai Dinamisator**

Mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat LKSMD seharusnya lebih bijaksana dalam memantau serta melihat berbagai kegiatan-kegiatan serta program yang ada di lingkungan masyarakat. Selain harus bijaksana pemantauan kegiatan masyarakat, LKSMD juga diharapkan untuk bisa menempatkan dirinya ditengah masyarakat dan mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam program-program yang dibuat oleh LKSMD. Layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi serta lain-lainnya, sedah mulai

LKSMD berikan. Meskipun tidak belum maksimal namun sudah ada perhatian dari LKSMD untuk pendidikan mereka memberikan bantuan beasiswa dengan cara memasukan proposal kebeberapa instansi dan bank-bank yang ada di Desa Buntu Pema. Beasiswa tersebut akan diberikan kepada siswa yang berprestasi dan tidak mampu. Adapun pengawasan yang diperlukan untuk mengawasi perencanaan program yang berbentuk pembangunan. Dengan adanya pengawasan dari pihak lain selain LKSMD akan memperkecil dampak negatif yang mungkin saja akan timbulkan dikemudian harinya. Berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator didalamnya sebagai berikut :

**a. LKSMD Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Program Pembangunan**

Masyarakat yang ikut berperan dalam pelaksanaan operasional pembangunan merupakan suatu hal yang memang sudah seharusnya terjadi. Dengan keikut sertaan masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan sangat membantu berjalannya program-program yang dilaksanakan oleh LKSMD beserta orang Desa. Kerjasama antara masyarakat dan pihak LKSMD yang sangat baik mampu memberikan kemajuan pembangunan yang ada di Desa Buntu Pema. Adapun keberhasilan pembangunan merupakan tercapainya semua program-program yang sudah direncanakan oleh pihak pemerintah.

Program tidak akan bisa tercapai apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga untuk

mendapatkan pencapaian yang maksimal masyarakat harus bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, baik itu yang bersifat tenaga, pikiran maupun materi. Agar apa yang dilakukan masyarakat dapat termonitoring dengan baik, dan bahkan untuk mengetahui sudah sampai dimana program pemerintah yang telah difasilitasi oleh LKSMD tersebut, sehingga peneliti melakukan wawancara kepada para informan dan key informan dengan pertanyaan dan jawaban yang peneliti peroleh sebagai berikut: Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai pemantauan dan pengawasan dari pihak LKSMD terhadap kegiatan program pembangunan? Adapun jawaban yang di peroleh peneliti dari hasil wawancara beberapa informan sebagai berikut:

*“Mereka ikut memantau serta mengawasi pembangunan yang sedang berjalan”. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan Bapak Gasali, Seksi pembangunan perekonomian dan koperasi LKSMD Desa Buntu Pema).*

Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan LKSMD yang ditunjukkan dengan ikut bekerja maupun memberikan swadaya dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah yang menjadi prioritas di Desa Buntu Pema sesuai kebutuhan masyarakat demi kemajuan pembangunan di Desa Buntu Pema.

Keberhasilan suatu pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya program yang telah direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik dalam



pelaksanaan maupun memberikan bantuan tenaga, pikiran maupun materi yang bertujuan untuk menyukseskan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Desa Buntu Pema. Maka dari itu LKSMD harus melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap kegiatan pembangunan agar apa yang dilakukan masyarakat dapat terpantau dengan baik. Maka agar mengetahui sejauh mana LKSMD melaksanakan perannya maka dapat dilihat dari informasi yang disampaikan oleh tokoh pemuda bahwa:

“LKSMD Desa Buntu Pema disini tidak melakukan pemantauan secara bertahap, mereka hanya mengecek disaat awal berjalannya program pembangunan dan setelah selesainya pelaksanaannya program pembangunan tersebut. Setelah selesai proses semua itu sama sekali tidak ada. Maka perannya tidak berjalan maksimal”.(Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa peran LKSMD tidak dilaksanakan secara maksimal karena dilihat dari informasi dari tokoh pemuda bahwa pemantauan yang dilaksanakan hanya diawal dan diakhir penyelesaian pembangunan saja setelah itu sama sekali tidak ada. Dari informasi di atas maka selanjutnya dilakukan wawancara dengan kepala lingkungan yang dimana dalam pelaksanaan pemantauan pembangunan apakah benar tidak dilakukan secara maksimal, maka dikemukakan oleh bapak selaku kepala desa bahwa:

“Pembangunan fisik yang telah dibangun yah berjalan dengan semestinya. Sebagai kepala Desa saya belum pernah melihat anggota ataupun ketua LKSMD melakukan pemantauan secara langsung jika pembangunan tersebut sudah selesai.” (Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2017).

Kurang maksimalnya peranan Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema juga disebabkan karena kurang perhatiannya pemerintah Kabupaten Enrekang terhadap Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema. Hal ini terbukti sampai sekarang Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) belum berbadan hukum. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) yang mengatakan bahwa:

“Organisasi Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema ini tidak berbadan hukum, beberapa kali kami melakukan pertemuan di kantor Bupati yang katanya akan diakta notariskan namun pada kenyataannya tidak ada yang dilakukan, maka dari itu peran kami sebagai LKSMD masih kurang maksimal. (Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi hambatan Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam melaksanakan perannya di Desa Buntu Pema salah satunya kurang perhatiannya pemerintah Kabupaten Enrekang dengan Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) ini. Faktor lain yang menjadi penghambat kurang maksimalnya peran Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) yaitu Desa Buntu Pema tidak memerdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada salah satunya Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam hal program pembangunan. Dalam melakukan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dialihkan

kepihak ketigakan yaitu kontraktor yang seharusnya sudah menjadi kewenangan Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD). Hal ini disebabkan adanya kepentingan politik yang mendominasi pekerjaan di Desa Buntu Pema.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) yang mengatakan bahwa :

“Bagaimana lembaga kami bisa berperan dengan semestinya jika program pembangunan yang semestinya dikerjakan oleh pihak kami namun pada kenyataannya dialihkan ke pihak ketiga yaitu kontraktor .” (Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2017)

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pembangunan dibutuhkan sebuah perencanaan yang dimana dalam menentukan perencanaan dibutuhkan partisipasi masyarakat. Ada tiga alasan utama pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan yaitu sebagai langkah awal untuk mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan satu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan, yang kedua sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat, dalam menentukan program-program pembangunan yang dilaksanakan.

Agar terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka dibutuhkan komunikasi pembangunan artinya tujuan komunikasi pembangunan bukanlah sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan menyampaikan pesan-pesan tentang pembangunan

saja tetapi yang lebih penting dalam komunikasi pembangunan yaitu menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui komunikasi pembangunan dapat ditempuh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tipe partisipasi masyarakat menurut (Fujikake, 2008:104) ada tujuh tipe yaitu:

1. Partisipasi pasif

- a) Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi.
- b) Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat.
- c) Informasi yang di pertukarkan terbatas pada kalangan professional di luar kelompok sasaran.

2. Partisipasi informatif

- a) Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.
- b) Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian.
- c) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

3. Partisipasi konsultatif

- a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi
- b) Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya
- c) Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama
- d) Para professional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan

e) Masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti

#### 4. Partisipasi insentif

a) Masyarakat memberikan korbanan/jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif atau upah

b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan

c) Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.

#### 5. Partisipasi fungsional

a) Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek

b) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati

c) Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya

#### 6. Partisipasi interaktif

a) Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan

b) Cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis

c) Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan

## 7. Self mobilization (mandiri)

- a) Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki
- b) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan
- c) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

Berdasarkan tipe partisipasi masyarakat di atas bahwa masyarakat di Desa Buntu Pema termasuk pada partisipasi pasif dimana masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, masyarakat hanya menunggu informasi dan arahan dari pihak pelaksana.

Tentang hal di atas yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Buntu Pema menurut informasi dari Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Buntu Pema ini sebenarnya peran LKSMD di Desa Buntu Pema kurang maksimal karena dilihat dari partisipasi masyarakat yang masih kurang keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan dan juga apabila ada bantuan dari pemerintah yang masuk selalu dipihak ketigakan yaitu beralih ke kontraktor yang seharusnya menjadi kewenangan dari LKSMD dan juga LKSMD tidak proaktif pada pembangunan. Maka dari itu partisipasi masyarakat di sini masih kurang dan LKSMD di desa ini kurang berperan sebagaimana mestinya”. (Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa partisipasi masyarakat di Desa Buntu Pema sangat rendah di sebabkan kurang maksimalnya peran Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di karenakan dari informasi yang di berikan oleh Kepala Desa bahwa pihak LKSMD kurang proaktif dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Buntu Pema. Dan juga masyarakatnya pun dengan kondisi LKSMD yang kurang berperan aktif dalam pembangunan maka mereka pun acuh tak acuh juga dengan masalah pembangunan di Desa Buntu Pema. Maka wajar apabila ada masyarakat tidak ikut serta dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Dari pernyataan Kepala Desa Buntu Pema mengenai partisipasi masyarakat di tambah juga oleh tokoh masyarakat sebagai ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menyatakan bahwa:

“Kelemahan dari Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema karena tidak proaktif menjemput proyek, kalau ada proyek yang masuk dia tahu bahwa dipihak ketigakan atau yang melaksanakannya adalah kontraktor bukan dari pihak LKSMD yang seharusnya menjadi kewenangannya namun dia hanya terima saja yang seharusnya dia kritisi, maka untuk hal meningkatkan partisipasi masyarakat di desa ini susah untuk di katakan bagus karena dilihat dari pihak LKSMD yang tidak proaktif maka masyarakatnya pun ikut acuh tak acuh dan mengikuti saja apa yang menjadi keputusan dari pihak desa”. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017).

Berdasarkan informasi yang diperoleh di atas bahwa LKSMD di Desa Buntu Pema kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya karena dapat dilihat dari informasi dari

tokoh masyarakat dan kepala lingkungan bahwa tugas dan fungsi dari LKSMD tidak berjalan dengan semestinya karena setiap ada bantuan dari pemerintah yang melaksanakan pembangunan tersebut adalah dipihak ketigakan yang dialihkan ke kontraktor yang seharusnya menjadi kewenangan dari LKSMD (Lembaga Kerja Swadaya Masyarakat Desa) di Desa Buntu Pema.

Terkait dengan partisipasi masyarakat, ada empat lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program pembangunan di wilayah setempat.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, perlu adanya pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga/masyarakat.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai



sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik tentang masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

#### 4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil pembangunan, misalnya: memanfaatkan jembatan penyeberangan jalan, dan sebagainya.

Berdasarkan keempat lingkup partisipasi masyarakat di atas bahwa agar dapat terciptanya pembangunan yang diinginkan maka perlu adanya peran serta masyarakat dalam berpartisipasi pada perencanaan maupun pelaksanaan suatu pembangunan seperti ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat kurang maksimalnya peranan LKSMD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Buntu Pema yaitu tidak proaktifnya ketua LKSMD terhadap program pembangunan, maka setiap pembangunan yang dilaksanakan yang menanganinya dipihak ketigakan hal ini juga disebabkan kurang bertanggung jawabnya

pihak LKSMD maka dari itu setiap program pembangunan di alihkan ke kontraktor dan pihak LKSMD hanya menerima saja keputusan yang ada.

**b. LKSMD Melakukan Evaluasi pada Program Pembangunan.**

Evaluasi pada program pembangunan memang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali, guna untuk mengetahui perubahan pembangunan baik itu bersifat fisik maupun nonfisik. Kegiatan LKSMD merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan baik dari pihak LKSMD sendiri maupun bersama pihak masyarakat yang ada di Desa Buntu Pema. Untuk mengetahui LKSMD melakukan evaluasi atau tidak, peneliti langsung saja melakukan wawancara kepada informan-informan yang ada beserta key informan. Dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: Menurut Bapak/Ibu apakah LKSMD melakukan evaluasi pembangunan pembangunan? Jelaskan! Adapun jawaban yang di peroleh peneliti dari beberapa informan sebagai berikut:

*“Evaluasi tiap tahun selalu dilakukan, malah dijadikan hal yang penting tiap tahunnya, supaya mengetahui kondisi pembangunan baik itu fisik maupun non fisik. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan dengan Bapak Gasali, Seksi pembangunan perekonomian dan koperasi LKSMD Desa Buntu Pema).*

**B. Arah Pembangunan yang dilaksanakan oleh LKSMD**

Kebijakan umum dirumuskan untuk menguraikan program-program yang dilaksanakan berikut target sasaran hasil pembangunan yang akan dicapai.

Kenijakan umum disesuaikan dengan visi dan misi serta berlandaskan pada hasil-hasil pembangunan dan mempertimbangkan kondisi, potensi permasalahan maupun tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang digunakan untuk:

1. Menetapkan secara teliti tentang program yang akan dilaksanakan.
2. Mengatur suatu mekanisme tindak lanjut untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
3. Menciptakan kondisi-kondisi setiap pelaksana pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh dukungan agar dapat mengimplementasikan keputusan.

Arah kebijakan pembangunan Desa Buntu Pema sebagai berikut:

1. Tercapainya penyelenggaraan Pemerintah Desa yang tertib dan lancar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Tercapainya kemitraan, kebersamaan serta kerjasama yang baik dengan Lembaga-lembaga Desa, masyarakat serta pihak-pihak lain.
3. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat.
6. Tercapainya peningkatan ketertiban masyarakat.

### **C. Potensi untuk menaggulangi hambatan dan masalah dalam yang dilakukan LKSMD untuk pembangunan masyarakat desa**

Adapun potensi atau kekuatan yang dimiliki Desa Buntu Pema adalah sebagai berikut:

1. Luas Desa Buntu Pema 4922 hektar` merupakan potensi keruangan untuk pengembangan wilayah yang memadai.
2. Jumlah penduduk Desa Buntu Pema sebanyak 2.222 jiwa dengan prosentase penduduk produktif sebanyak 80% atau sebanyak 1641 jiwa merupakan potensi tenaga kerja.
3. Tanah pertanian yang berupa tegal seluas 6 hektar, dan kebun seluas 498 hektar merupakan potensi untuk pengembangan pertanian.
4. Tanah pekarangan seluas 30,106 hektar selain digunakan untuk pemukiman juga merupakan potensi pengembangan hortikultura.
5. Adanya budidaya peternakan antara lain penggemukan sapi, ternak kambing, ternak ayam dan lain-lain.

Adanya minat kemampuan dan kebiasaan masyarakat dalam hal budidaya peternakan antara lain penggemukan sapi, ternak kambing, ternak ayam dan lain-lain merupakan potensi untuk pengembangan peternakan. Menyikapi hal ini, kondisi alam yang ada di Desa Buntu Pema yang terdiri dari perbukitan merupakan potensi untuk pengembangan kehutanan.

Usaha mikro atau industri rumah tangga yang telah ada berupa pengolahan kayu, pengrajin makanan olahan seperti bakso, kerupuk, tempe, tahu dan lain-lain.

Perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat. Tersedianya infrastruktur jalan sebagai sarana pengembangan perekonomian masyarakat. Sedangkan permasalahan yang

dihadapi Desa Buntu Pema yang membutuhkan penanganan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya penduduk miskin yang ada di Desa Buntu Pema
- 2) Bencana kekeringan yang selalu terjadi setiap musim kemarau dan kondisi lahan pertanian yang hanya mengandalkan air hujan, serangan hama tanaman, menyebabkan tingginya resiko kegagalan budidaya pertanian sehingga mengakibatkan produktifitas rendah, kurangnya informasi pasar, rendahnya penguasaan teknologi dan lemahnya akses permodalan.
- 3) Keterbatasan kemampuan baik modal maupun pengetahuan dalam hal peternakan, terbatasnya penyediaan Hijauan Pakan Ternak khususnya dimusim kemarau sehingga kurang optimalnya produksi peternakan.
- 4) Terbatasnya modal serta ketersediaan air mengakibatkan minimnya produksi perikanan darat.
- 5) Rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya keterampilan yang dimiliki penduduk sehingga pasar tenaga kerja hanya pada sektor informal.
- 6) Pendapatan Asli Desa yang rendah.
- 7) Minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan banyaknya pengangguran.
- 8) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup.

- 9) Kondisi jalan poros desa yang rusak mengakibatkan terganggunya akses transportasi dari dan ke pusat Pemerintahan Desa.

Ancaman dari luar yang dihadapi Desa Buntu Pema bila tidak ditangani akan berpengaruh terhadap upaya pelaksanaan pembangunan antara lain:

- 1) Persaingan antar desa yang semakin meningkat
- 2) Efek globalisasi yang mengakibatkan persaingan bebas antarnegara yang mengakibatkan melemahnya semangat nasionalisme dan lunturnya budaya lokal.
- 3) Kurrang adanya kesepahaman persepsi tentang prinsip otonomi desa.
- 4) Ketergantungan pembiayaan pembangunan nasional pada lembaga donor.

#### **D. Program LKSMD untuk meningkatkan pembangunan desa**

Berdasarkan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan maka untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dan untuk media evaluasi knerja program dan kegiatan agar rencana tersebut lebih terarah, terinci dan terukur maka perlu dijabarkan kedalam matriks rencana program pembangunan dan indikasi kegiatan. Matriks ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja.

#### **E. Strategi LKSMD dalam pencapaian tujuan dan harapan masyarakat desa**

Strategi merupakan arah umum, sasaran, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi misi yang akan dilakukan. Strategi merupakan perumusan

langkah-langkah dan program-program yang menjadi pedoman serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan. Berdasarkan strategi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kemampuan desa serta memanfaatkan program pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam mendukung kelancaran pembangunan desa di Desa Buntu Pema, Kec. Curio, Kab. Enrekang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. LKSMD sebagai fasilitator, masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan dan penentuan prioritas yang diadakan oleh LKSMD. Selain itu dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti kepada ketua LKSMD Desa Buntu Pema, bahwa masyarakat yang ikut dalam perencanaan pembangunan itu ada, namun memang tidak secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan sebagian besar dari masyarakat yang ada di Desa Buntu Pema berprofesi sebagai petani dan pedagang, sehingga mereka enggan untuk meninggalkan barang dagangan mereka.
2. LKSMD sebagai mediator; kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat serta memberikan informasi bagi berjalannya program. Selain itu masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam memahami betapa pentingnya program pembangunan yang dibuat oleh LKSMD di Desa Buntu Pema.
3. LKSMD sebagai motivator; dilihat dari segi pemanfaatan masyarakat terhadap pembangunan yang ada. Akan tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Desa Buntu Pema dalam segi merawat atau



menjaga pembangunan yang ada. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga atau merawat pembangunan yang merupakan fasilitas untuk mereka sendiri.

4. LKSMD sebagai dinamisator; dilihat dari pengawasan dan pemantauan yang LKSMD lakukan sudah cukup maksimal. Karena pembangunan yang mereka laksanakan ada tahapan dan waktu yang di tentukan. Selai itu LKSMD tidak ingin program yang mereka rencanakan menjadi sia-sia. Sehingga mereka melakukan pemantauan dan pengawasan semaksimal mungkin. Contoh pembangunan yang mereka pantau yaitu semenisasi di Lorong Pasar Ikan V. Pembangunan memiliki tahap waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender.

Hasil kesimpulan di atas, dapat penulis tarik kesimpulan seara keseluruhan yaitu peran LKSMD Desa Buntu Pema sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh tanggapan dari masyarakat Desa Buntu Pema. Yang mana peran LKSMD Desa Buntu Pema sudah melakukan tugasnya sesuai dengan acuan LKSMD, akan tetapi tidak berjalan maksimal sesuai dengan harapan. Contohnya pada saat di adakan rapat, masyarakat kurang antusias karena lebih memilih bekerja dari pada ikut dalam rapat.

## **B. Saran**

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan LKSMD dan korelasi dengan desa belum terwujud sehingga partisipatif masyarakat desa belum optimal, agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah

dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan dusun maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.

2. LKSMD dan pemerintah desa perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai dari tingkat RT supaya desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta pemerintah desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan masyarakat desa dapat mendekati kebutuhan masyarakat yang diharapkan.
3. Perlu ada peningkatan pemahaman LKSMD dan perangkat desa, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader LKSMD agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan, peran akan terwujud dengan baik apabila pemerintah, fasilitator desa dan masyarakat dapat bekerja sama. Baik itu dalam program perencanaan, pelaksanaan kegiatan, mengawasi, merawat dan memberdayakan bangunan yang telah dibangun dalam kegiatan ini. Peneliti menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa Peranan LKSMD di Desa Buntu Pema sudah baik dan berjalan sesuai dengan semestinya atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun respon dari masyarakat di desa itu sendiri yang kurang menanggapi Program dari Pemerintah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fujikake, Yoko. 2008. *Qualitative Evaluation: Evaluating People's Empowerment*, *Japanese Journal of Evaluation Studies*, Vol 8 No 2, 2008, pp 25 – 37, Japan Evaluation Society
- Hanafi, Mahduh M. 2004. *Pengantar Manajemen*. UIR Press,
- Efendy, Zainal. 2001. *Selayang Pandang "Temu LKMD Tingkat Nasional 2000"*. Jakarta: Pes.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Kansil, C.S.T. 1983. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Nasional.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian program Pembangunan*, penerbit Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Manullang, 2004, *Dasar – Dasar Manajemen*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Marbun, BN. 1998. *Proses Pembangunan Desa*. Elrlangga: Jakarta
- Moleong, Lexi J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Ruttan VW and Hayami Y. 1984. *Toward a theory of induced institutional innovation*. *Journal of Development Studies*.
- Siagian Sondang P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Singarimbun. 2008. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES.
- Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudirwo, D. 1985. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Pemerintahan Desa*. Bandung: Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

- Swedianti, Karina. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pnpm Mandiri Perkotaan (Kasus Implementasi Program Ekonomi Bergulir Pnpm Mandiri Perkotaan Di Desa Cimanggu I Kecama*
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Manajemen Pembangunan*. Gunung Agung: Jakarta.
- Uphoff N. 1986. *Local Institutional Development*. West Hartford. CT. Kumarian Press. Williamson OE. 1985. *Economic Institutions of Capitalism: Firms, markets, relational contracting*. The Free Press. Macmillan, New York: London.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Wasistiono Sadu dan Tahrir Irwan, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, CV. Fokus Media.
- Widjaja, Haw. 2003. *Titik Berat Otonomi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Wrihatnolo, Randy dan Riant Nugroho Dwi djowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantardan Panduan untuk pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Ar Ruzz Media.

#### **SumberUndang-Undang :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Daerah KabupatenTapanuli Selatan Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

## **PEDOMAN OBSERVASI**

### **A. IDENTITAS TEMPAT OBSERVASI**

1. Nama Tempat : Desa Buntu Pema
2. Alamat : Desa Buntu Pema, Kec. Curio, Kab. Enrekang.
3. Waktu Observasi : 5 September 2017 – 30 September

### **B. HAL-HAL YANG DI OBSERVASI**

1. Strategi pembangunan desa.
2. Peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) dalam mendukung kelancaran pembangunan desa di Desa Buntu Pema, Kec. Curio, Kab. Enrekang.
3. Pelaksanaan pembangunan oleh Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema, Kec. Curio, Kab. Enrekang.
4. Kesimpulan Observer.

## **PEDOMAN TELAAH DOKUMEN**

- A. 1. Identitas tempat : Desa Buntu Pema
2. Alamat : Desa Buntu Pema, Kec. Curio,  
Kab. Enrekang
3. Waktu pengambilan dokumen: 5 September 2017 – 30 September 2017
- B. Struktur organisasi desa Buntu Pema
- C. Dokumen yang berhubungan dengan strategi perencanaan pembangunan desa:
  1. Dokumen/ arsip yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan di desa Buntu Pema.
  2. Dokumen/foto-foto pelaksanaan pembangunan di desa Buntu Pema.

## **Pedoman Wawancara**

### **Untuk Kepala Desa Buntu Pema, Kec. Curio, Kab. Enrekang**

#### **I. Identitas Diri**

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)

2. Jabatan :

#### **II. Identitas Kelompok**

1. Apa yang menjadi target pembangunan Desa Buntu Pema di tahun ini?
2. Apa saja yang di lakukan pemerintah desa untuk mencapai pembangunan masyarakat di Desa Buntu Pema?
3. Lembaga apa saja yang membantu untuk melaksanakan pemerintahan di Desa Buntu Pema
4. Apakah tujuan berdirinya Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
5. Bagaimanakah cara melakukan rekrutmen pengurus/pengelola Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
6. Bagaimana hubungan atau kerjasama pemerintah desa dengan Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
7. Apa peran Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) Desa di Desa Buntu Pema?
8. Berapa lama jangka waktu diadakan pertemuan desa dan Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
9. Program apa saja yang harus melibatkan Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?

**Pedoman Wawancara**  
**Untuk Pengurus Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD)**  
**di Desa Buntu Pema**

**I. Identitas Diri**

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)
2. Jabatan :

**II. Identitas Kelompok**

1. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
2. Apakah tujuan berdirinya Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
3. Berapa jumlah tenaga dan adakah syarat-syarat menjadi pengelola Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
4. Bagaimanakah cara melakukan rekrutmen pengurus/pengelola?
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
6. Dari manakah kegiatan itu berasal dan adakah pembagian tugas dalam kegiatannya?
7. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa Buntu Pema?
8. Program apa saja yang ada di Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) Desa Buntu Pema?
9. Apakah program-program yang diadakan tadi semuanya berhasil?
10. Kalau ada yang tidak berhasil, apa saja kendalanya?



### **III. Sarana dan Prasarana**

1. Dana
  - a. Berapa besar dana yang diperlukan untuk kegiatan perencanaan dan pembangunan pada Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
  - b. Dari manakah dana itu diperoleh?
  - c. Bagaimana pengelolaan dana tersebut?
2. Tempat dan peralatan
  - a. Status tempat milik siapa?
  - b. Apa saja fasilitas yang digunakan dan dari mana memperolehnya?
  - c. Bagaimana pemanfaatan peralatan yang ada?

### **IV. Anggota Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) Desa Buntu Pema dan Perencanaan Program LPMD Desa Buntu Pema**

1. Berapa jumlah anggota Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap perencanaan program-program Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
3. Bagaimana motivasi anggota Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema dalam mengikuti perencanaan program-program kegiatan yang ada?
4. Apakah program-program yang telah dirancang oleh Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema telah mampu menjawab kebutuhan anggota Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD)?

5. Apabila ada kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan anggota Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
6. Apakah ada kendala yang dihadapi Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema dalam mengelola dan memberdayakan anggota Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD)?
7. Apabila ada kendala seperti apa yang dihadapi?

**Pedoman Wawancara**  
**Untuk Masyarakat di Desa Buntu Pema**

**I. Identitas Diri**

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)
2. Jabatan :

**II. Pertanyaan Untuk Masyarakat Desa Buntu Pema**

1. Sudah berapa lama saudara mengikuti kegiatan Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
2. Motivasi apa yang mendorong Saudara mengikuti kegiatan Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
3. Manfaat apa yang anda dapatkan Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
4. Apakah program Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema mengganggu kegiatan keseharian anda?
5. Bagaimana pendapat saudara tentang segala jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
6. Bagaimana peran saudara dalam kegiatan Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) di Desa Buntu Pema?
7. Apakah menurut anda ada perbedaan setelah dan sebelum adanya program perencanaan dan pembangunan di Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa (LKSMD) Desa Buntu Pema?
8. Menurut anda apakah pelaksanaan program pembangunan desa membantu anda dalam kegiatan sehari-hari?

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

### **DATA PRIBADI**

Nama : BAHARUDDIN  
Tempat/Tanggal Lahir : ENREKANG, 15DESEMBER 1969  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Suku : BUGIS  
Status Pernikahan : Menikah

### **DATA PENDIDIKAN**

Sekolah Dasar : SD Lemahabang Kec. Bone-Bone tahun 1985  
Sekolah Menengah Pertama : Mts Negeri 1 Palopo tahun 1987  
Sekolah Menengah Atas : Peket C Masamba tahun 2005  
Strata Satu : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Makassar

### **RIWAYAT PEKERJAAN**

Instansi : - Kantor Camat Curio Kec. Curio Kab. Enrekang  
Alamat Kantor : Jl.Buntubenteng, Enrekang  
Jabatan : Staff Kantor Camat Curio  
Masa Kerja :18 Tahun